



# LAPORAN AKHIR

Rencana Aksi Tahunan (RAT)  
Penanggulangan Kemiskinan Kota  
Bontang Tahun 2025

Kerjasama  
**Universitas Indonesia Timur &  
Pemerintah Kota Bontang**



**Lembaga Riset UIT  
BAPELITBANG Kota Bontang 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Akhir penelitian yang berjudul **Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen kajian yang komprehensif dan implementatif sebagai dasar dalam merumuskan rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kota Bontang. Dalam proses penyusunan dokumen ini, digambarkan berbagai pendekatan dan metodologi yang akan digunakan selama proses penelitian, guna memastikan bahwa rencana aksi yang nantinya dihasilkan tidak hanya berdasarkan data dan fakta yang akurat, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam konteks lokal oleh pemerintah Kota Bontang.

Penelitian ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bontang, khususnya kepada Bapak Walikota Bontang yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga.

Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dan seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan saran serta kritik yang konstruktif selama proses penyusunan laporan pendahuluan ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka

terhadap saran dan masukan yang dapat memperbaiki dan menyempurnakannya. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan penelitian penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Bontang dan dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan di Kota Bontang.

Bontang, Oktober 2024

Peneliti,  
Universitas Indonesia Timur

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	9
C. Maksud dan Tujuan .....	11
D. Sasaran Kegiatan.....	11
E. <i>Output</i> Kegiatan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA .....	13
A. Gambaran Umum Kota Bontang .....	13
1. Profil Kota Bontang .....	13
2. Data-Data Kemiskinan .....	23
B. Kondisi Umum Kemiskinan Kota Bontang .....	47
1. Garis Kemiskinan .....	47
2. Presentase Penduduk Miskin .....	47
3. Indeks Keparahan Kemiskinan .....	48
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan .....	49
C. Distribusi Kemiskinan Berdasarkan Wilayah .....	51
1. Kelurahan Tanjung Laut.....	51
2. Kelurahan Api-Api.....	57
3. Kelurahan Tanjung Laut Indah .....	63
4. Kelurahan Bontang Barat .....	68
5. Kelurahan Bontang Kuala .....	73
6. Kelurahan Kanaan .....	78
BAB III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	84
A. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang.....	84
B. Program Kemiskinan Tahun 2024.....	85
BAB IV. RENCANA AKSI TAHUNAN.....	88
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	88

B. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025	94
C. Rencana Aksi Skala Prioritas .....	100
BAB V. PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran/Rekomendasi .....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Luas Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bontang .....	17
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Bontang Kec. Bontang Utara Semester I Tahun 2024.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota Bontang Kec. Bontang Selatan Semester I Tahun 2024.....	21
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Bontang Kec. Bontang Barat Semester I Tahun 2024.....	22
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester I Tahun 2024	22
Tabel 2.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Bontang .....	27
Tabel 2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Bontang.....	27
Tabel 2.8	Jumlah Dokter Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan dan Jenis Tenaga Kedokteran di Kota Bontang .....	29
Tabel 2.9	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitasnya.....	30
Tabel 2.10	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bontang .....	33
Tabel 2.11	Jumlah Usaha Penyediaan Makanan/Minuman Menurut Jenis Usaha di Kota Bontang.....	34
Tabel 2.12	Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Bontang	35
Tabel 3.1	Program Penanggulangan Kemiskinan.....	85
Tabel 4.1	Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bontang (2025) .....	95
Tabel 4.2	Matriks Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Luas Kecamatan Kota Bontang .....	14
Gambar 2.2	Luas Wilayah Kecamatan Bontang Selatan.....	15
Gambar 2.3	Luas Wilayah Kecamatan Bontang Utara .....	16
Gambar 2.4	Luas Wilayah Kecamatan Bontang Barat .....	17
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2024.....	19
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Kec. Bontang Utara	20
Gambar 2.7	Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Kec.Bontang Selatan	21
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Kec.Bontang Barat	22
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan Kota Bontang .....	37
Gambar 2.10	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kota Bontang .....	43
Gambar 2.11	Garis Kemiskinan/Rupiah/Kapita/Bulan .....	47
Gambar 2.12	Presentase Penduduk Miskin.....	48
Gambar 2.13	Indeks Keparahan Kemiskinan.....	49
Gambar 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan .....	49
Gambar 2.15	Analisis Infrastruktur di Kelurahan Tanjung Laut .....	51
Gambar 2.16	Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Tanjung Laut	53
Gambar 2.17	Analisis Kualitas Kesehatan di Kellurahan Tanjung Laut	54
Gambar 2.18	Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Tanjung Laut....	55
Gambar 2.19	Analisis Infrastruktur di Kelurahan Api-Api.....	57
Gambar 2.20	Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Api-Api .....	58
Gambar 2.21	Analisis Kualitas Kesehatan di Kelurahan Api-Api.....	60

Gambar 2.22 Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Api-Api .....	61
Gambar 2.23 Analisis Infrastruktur di Kelurahan Tanjung Laut Indah	63
Gambar 2.24 Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Tanjung Laut Indah.....	64
Gambar 2.25 Analisis Kualitas Kesehatan di Kelurahan Tanjung Laut Indah.....	65
Gambar 2.26 Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Tanjung Laut Indah	67
Gambar 2.27 Analisis Infrastruktur di Kelurahan Bontang Barat .....	68
Gambar 2.28 Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Bontang Barat	69
Gambar 2.29 Analisis Kualitas Kesehatan di Kelurahan Bontang Barat	70
Gambar 2.30 Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Bontang Barat..	71
Gambar 2.31 Analisis Infrastruktur di Kelurahan Bontang Kuala.....	73
Gambar 2.32 Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Bontang Kuala	74
Gambar 2.33 Analisis Kualitas Kesehatan di Kelurahan Bontang Kuala	75
Gambar 2.34 Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Bontang Kuala .	76
Gambar 2.35 Analisis Infrastruktur di Kelurahan Kanaan .....	78
Gambar 2.36 Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Kanaan .....	79
Gambar 2.37 Analisis Kualitas Kesehatan di Kelurahan Kanaan .....	80
Gambar 2.38 Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Kanaan .....	82
Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang (Prioritas 1) .....	89
Gambar 4.2 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang (Prioritas 2) .....	90
Gambar 4.3 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang (Prioritas 3) .....	91

Gambar 4.4 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang (Prioritas 4).....	92
Gambar 4.5 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang (Prioritas 5).....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan dan kemiskinan adalah dua komponen mendasar yang memainkan peran vital dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Kesejahteraan mencerminkan kemampuan individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai kualitas hidup yang layak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lainnya. Sebaliknya, kemiskinan menggambarkan kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang sering kali menyebabkan keterbatasan dalam peluang ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, para ahli dan pembuat kebijakan sepakat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pembangunan (Reza Widjaja, 2019). Pembangunan ekonomi yang berhasil tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga bagaimana hasil dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara merata di seluruh populasi. Peningkatan taraf hidup ini sering kali diukur melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, serta peningkatan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur yang berkualitas.

Kemiskinan dan kesejahteraan tidak hanya mempengaruhi individu atau rumah tangga, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi stabilitas sosial dan politik (Syahputra & Rofizar, 2023). Negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengurangi kemiskinan

cenderung menikmati stabilitas yang lebih besar, lebih sedikit ketegangan sosial, dan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan pertumbuhan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan publik, dan peningkatan risiko konflik. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Bank dunia sebagai salah satu lembaga terkemuka di bidang pembangunan global, memberikan panduan dan standar internasional untuk menilai dan mengatasi kemiskinan. Salah satu metode yang digunakan oleh Bank Dunia adalah menetapkan ambang batas kemiskinan internasional. Menurut standar ini, seseorang dianggap "sangat miskin" jika pendapatan hariannya kurang dari Rp 28.500, dan dianggap "miskin" jika pendapatannya kurang dari 48.000 per hari (berdasarkan nilai tukar paritas daya beli) (Alkire & Foster, 2011a) sedangkan BPS menetapkan garis kemiskinan nasional berdasarkan biaya kebutuhan dasar (basic needs approach) yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Pada tahun 2023, garis kemiskinan ditetapkan sekitar Rp 535,547 per kapita per bulan di daerah perkotaan dan Rp 475,280 di daerah pedesaan (BPS, 2024). Standar ini memberikan kerangka acuan yang penting untuk mengukur dan membandingkan tingkat kemiskinan di berbagai negara, serta membantu merancang kebijakan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Tantangan global dalam mengatasi kemiskinan memerlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, dengan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak.

Studi tentang kemiskinan mencakup dua paradigma besar yang sering di bahas yaitu kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas (*Neoliberalisme*) (Piketty, 2014). Menurut pandangan ini, kemiskinan dianggap sebagai masalah individu yang akan teratasi dengan sendirinya jika pasar diperluas dan pertumbuhan ekonomi dipacu. Sebaliknya, teori demokrasi sosial melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yang timbul dari ketidakadilan sosial dan kesenjangan akses terhadap sumber daya. Sehingga, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan strategi yang melibatkan pemberdayaan, keadilan ekonomi, dan campur tangan pemerintah. Di samping kedua paradigma itu, konsep-konsep modern tentang kemiskinan kini mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, seperti yang diterapkan oleh Bank Dunia dan UNDP. Kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan atau konsumsi, tetapi juga meliputi kebutuhan dasar, hak asasi manusia, aset, kapabilitas, inklusi sosial, dan kesejahteraan subjektif (World Bank, 2000).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya, suku dan agama melakukan berbagai program dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan pendekatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana penanggulangan kemiskinan masuk pada agenda ketiga yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, jaminan terkait penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab utama pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Nilai ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang

menekankan pentingnya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen terhadap kemiskinan dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa fakir miskin mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Sebagai turunan dari cita-cita dasar yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut, berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencakup upaya-upaya konkret seperti penyediaan bantuan sosial, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat miskin

Pemerintah melakukan penanganan pengentasan kemiskinan dengan menyusun langkah strategis seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh untuk mencapai peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai

yang tertuang dalam RPJMN tidak dapat tercapai apabila hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Dibutuhkan peran aktif dan langkah strategis dari kabupaten/kota sebagai pelaku otonomi daerah yang mengenal secara dekat kondisi dan karakteristik kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah/kota yang menjadi wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 harus ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah/kota yang menjadi lokasi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kabupaten Bontang, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022. Menindaklanjuti keputusan ini, Pemerintah Kota Bontang mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/328/Bapelitbang/2022, dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang. Upaya akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia pada tahun 2030. Secara khusus, Indonesia telah menetapkan target utama untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem global pada tahun 2024, menjadikan inisiatif

pemerintah Kota Bontang sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan nasional dan global ini.

Untuk mencapai penurunan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Bontang telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode lima tahun (2022-2026). RPKD merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia. Saat ini, RPKD Kota Bontang telah berjalan dengan melakukan beberapa program kegiatan pada tahun 2023, menunjukkan komitmen daerah dalam mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Program prioritas di Kota Bontang dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai indikator seperti kependudukan, sosial-ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur di beberapa kelurahan pada tiga kecamatan utama. Hasil analisis dari penilaian terendah hingga tertinggi pada lima indikator tersebut, telah ditetapkan enam lokasi prioritas untuk program RPKD sebagai berikut:

1. Kecamatan Bontang Selatan:
  - a. Kelurahan Bontang Lestari
  - b. Kelurahan Tanjung Laut Indah
  - c. Kelurahan Tanjung Laut
2. Kecamatan Bontang Utara:
  - a. Kelurahan Api-Api

b. Kelurahan Bontang Kuala

3. Kecamatan Bontang Barat:

a. Kelurahan Kanaan

Pemilihan lokasi-lokasi ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh dari kondisi setiap kelurahan dan bertujuan untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Kota Bontang. Sebagai contoh, program-program bantuan sosial yang ditargetkan dengan baik dapat mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi mungkin tidak cukup untuk membantu mereka yang sangat miskin yang membutuhkan dukungan lebih substansial (Ravallion, 2016).

Namun, mereka yang tetap miskin mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti inflasi yang mempertinggi biaya hidup tanpa peningkatan pendapatan yang memadai, atau keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi yang bisa mengangkat mereka dari kemiskinan (Jolliffe & Prydz, 2016). Inflasi, misalnya, dapat memperburuk situasi bagi mereka yang paling miskin karena harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan mereka, memperdalam kesenjangan antara pendapatan mereka dan garis kemiskinan.

Akibatnya, indeks kedalaman kemiskinan meningkat karena rata-rata pendapatan orang miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, yang menunjukkan bahwa orang miskin yang tersisa berada dalam kondisi yang semakin parah. Kedalaman kemiskinan mengukur seberapa jauh pendapatan rata-rata dari orang miskin berada di bawah garis kemiskinan, dan peningkatan dalam indeks ini menunjukkan bahwa mereka yang miskin semakin tertinggal dalam hal pendapatan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan yang tetap menunjukkan bahwa distribusi

pendapatan di antara orang-orang miskin tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga ketimpangan dalam kelompok miskin tetap konstan. Ini berarti bahwa meskipun ada pergeseran jumlah orang miskin, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetap dalam kondisi yang serupa dalam hal distribusi pendapatan di antara mereka.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial tidak selalu merata atau menjangkau seluruh spektrum populasi miskin secara efektif. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan secara keseluruhan, jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif, maka tidak akan mengangkat kondisi kehidupan dari mereka yang paling miskin, memperdalam kesenjangan mereka dengan garis kemiskinan (Dollar & Kraay, 2002). Oleh karena itu, meskipun terdapat kemajuan yang terlihat dari berkurangnya angka kemiskinan, ada kebutuhan mendesak untuk strategi yang lebih inklusif yang tidak hanya fokus pada mengurangi jumlah orang miskin tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka yang berada dalam kemiskinan terdalam (UNDP, 2019).

Untuk mengatasi fenomena penurunan angka kemiskinan yang disertai dengan peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang tetap di Kota Bontang, diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terfokus. Dalam konteks ini, Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2025 untuk Kota Bontang harus disusun secara detail dengan merujuk pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bontang. RPKD ini menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk penanggulangan kemiskinan yang menekankan pada kebijakan yang dapat mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan secara efektif.

Dokumen RPKD Kota Bontang mengidentifikasi prioritas-prioritas strategis yang harus diintegrasikan ke dalam RAT, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Penyusunan RAT 2025 harus mempertimbangkan kondisi lokal dan mengimplementasikan program yang mampu mengatasi akar penyebab kemiskinan serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan terdalam.

Rencana aksi tersebut juga harus mempertimbangkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri, untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkelanjutan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin di Kota Bontang. Dengan demikian, RAT 2025 yang dirancang dengan baik dan merujuk pada RPKD Kota Bontang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan di kota ini.

## **B. Dasar Hukum**

Landasan hukum yang biasa digunakan pada penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota;
13. Perda Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang 2005-2025;

14. Perda Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
15. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bontang 2022-2026.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini agar Kota Bontang memiliki pedoman untuk penentuan program prioritas hingga rencana aksi penanggulangan kemiskinan dalam kegiatan pembangunan (dimasukkan dalam APBD) Kota Bontang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Bontang tahun 2025, berdasarkan dokumen RPKD Kota Bontang

### **D. Sasaran Kegiatan**

Pada dasarnya sasaran pelaksanaan pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya perangkat daerah yang pelaksanaan program kegiatannya bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan daerah tetapi juga para stakeholder baik perusahaan maupun lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan sosial maupun yang secara spesifik terjun langsung dalam penanggulangan kemiskinan.

### **E. Output Kegiatan**

Laporan lengkap dokumen kajian tentang Penyusunan Dokumen Akademis Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang memuat strategi meliputi :

1. Pengurangan beban dan pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan kantong-kantong kemiskinan

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI KINERJA**

#### **A. Gambaran Umum Kota Bontang**

##### **1. Profil Kota Bontang**

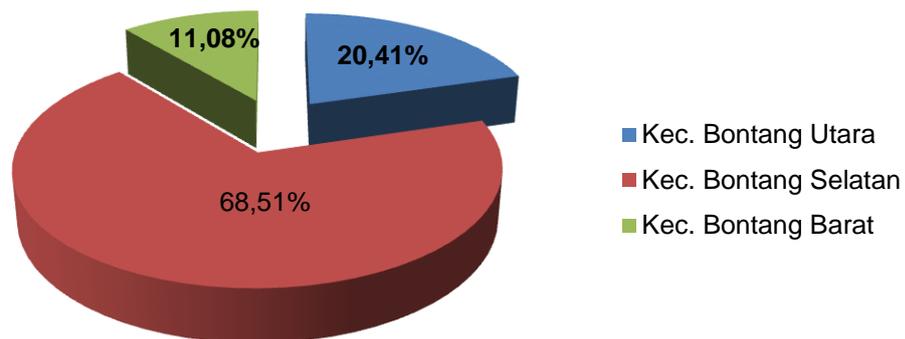
Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Selat Makasar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain diluar Kota Bontang baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Wilayah kota Bontang secara astronomis terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara dengan batas wilayah yang meliputi: Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat, Selat Makassar di sebelah timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.

Secara administrasi, Kota Bontang terbentuk pada Tahun 1999 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tergabung dalam Kabupaten Kutai dengan luas wilayah mencapai 161,88 km<sup>2</sup> dimana wilayah Kota Bontang didominasi oleh lautan.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan Kecamatan Bontang Barat. Jika dilihat berdasarkan kecamatan yang ada, Kecamatan Bontang Selatan merupakan kecamatan dengan wilayah yang terluas, yaitu 110,91 km<sup>2</sup> (68,51% dari total luas Wilayah Kota Bontang), disusul Kecamatan Bontang

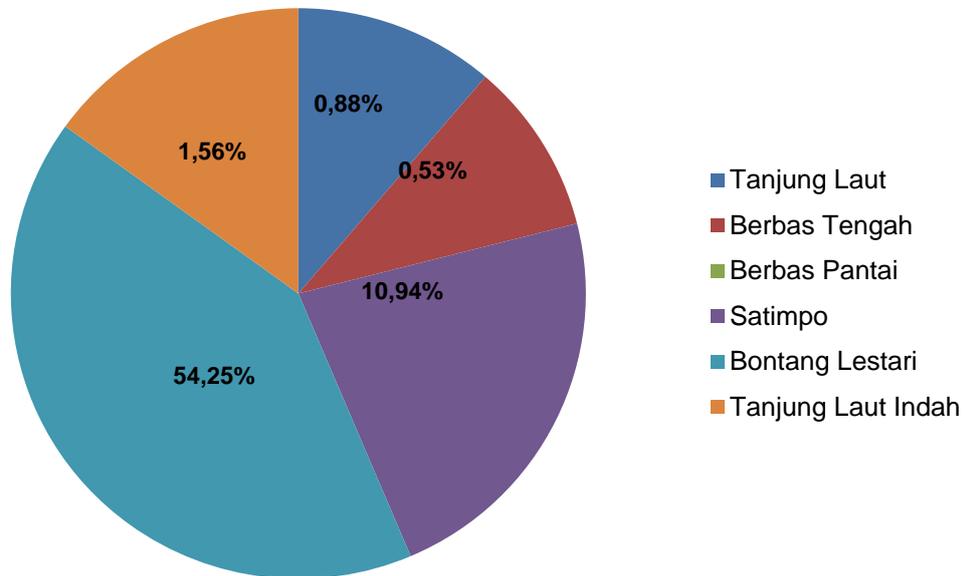
Utara (33,03 km<sup>2</sup> atau 20,41%) dan Kecamatan Bontang Barat (17,94 km<sup>2</sup> atau 11,08%). Secara keseluruhan wilayah kecamatan tersebut meliputi 15 kelurahan.

**Gambar 2.1**  
**Luas Kecamatan Kota Bontang**



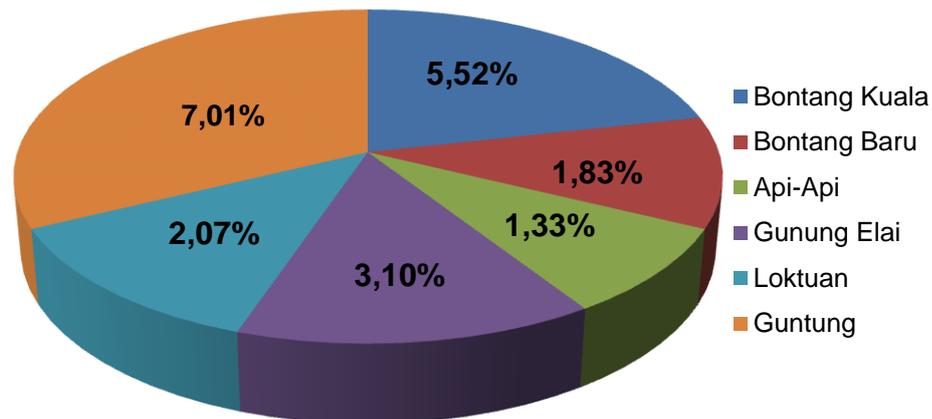
Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas enam kelurahan (Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah) dan 201 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Bontang Lestari memiliki wilayah paling luas diantara kelurahan lainnya yakni mencapai 8.782 km<sup>2</sup> (54,52% dari kontribusi keseluruhan luas Wilayah Kecamatan). Sedangkan Kelurahan Berbas Pantai merupakan kelurahan paling kecil di Kecamatan ini dengan luas wilayahnya mencapai 57 km<sup>2</sup> (0,53% dari kontribusi keseluruhan luas Wilayah Kecamatan)

**Gambar 2.2**  
**Luas Wilayah Kec. Bontang Selatan**



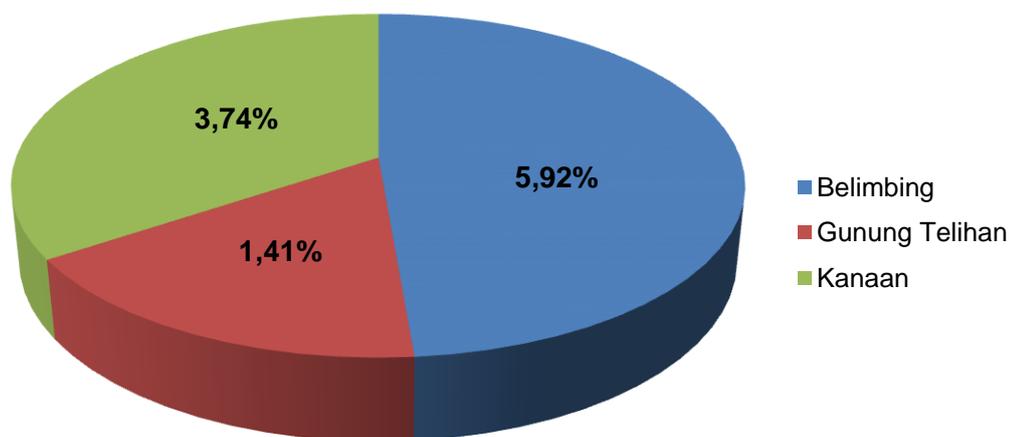
Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara terdiri atas enam kelurahan (Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, Loktuan, dan Guntung) dan 205 RT. Kelurahan Guntung memiliki wilayah paling luas diantara kelurahan lainnya yakni mencapai 1.135 km<sup>2</sup> (7,01% dari kontribusi keseluruhan luas Wilayah Kecamatan). Sedangkan Kelurahan Api-Api merupakan kelurahan paling kecil di Kecamatan ini dengan luas wilayahnya mencapai 215 km<sup>2</sup> (1,33% dari kontribusi keseluruhan luas Wilayah Kecamatan)

**Gambar 2.3**  
**Luas Wilayah Kec. Bontang Utara**



Kecamatan Bontang Barat terdiri dari tiga kelurahan (Kanaan, Gunung Telihan, dan Bellimbing) dan 93 RT. Kelurahan Belimbing memiliki wilayah paling luas diantara kelurahan lainnya yakni mencapai 959 km<sup>2</sup> (5,92% dari kontribusi keseluruhan luas Wilayah Kecamatan). Sedangkan Kelurahan Gunung Telihan merupakan kelurahan paling kecil di Kecamatan ini dengan luas wilayahnya mencapai 229 km<sup>2</sup> (1,41% dari kontribusi keseluruhan luas Wilayah Kecamatan)

**Gambar 2.4**  
**Luas Wilayah Kec. Bontang Barat**



**Table 2.1**  
**Persentase Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bontang**

Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Luas (%)	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Luas (%)
Bontang	16.188	Bontang Utara	3.303,97	20,41	Bontang Kuala	894	5,52
					Bontang Baru	224	1,38
					Lok Tuan	335	2,07
					Guntung	1.135	7,01
					Gunung Elai	502	3,10
					Api-Api	215	1,33
		Bontang Selatan	11.090,40	68,51	Tanjung Laut	143	0,88
					Berbas Tengah	85	0,53
					Berbas Pantai	57	0,35
					Satimpo	1.771	10,94
		Bontang Barat	1.793,63	11,08	Bontang Lestari	8.782	54,25
					Tanjung Laut Indah	252	1,56
					Belimbing	959	5,92
					Gunung Telihan	229	1,41
					Kanaan	605	3,74

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang, 2024.

Secara topografis, Kota Bontang di dominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0-125 m diatas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati

kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relatif Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai ke arah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihijaukan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.

Setiap wilayah Kecamatan di Kota Bontang memiliki perkembangan kawasan yang mulai berkembang. Kecamatan Bontang Utara yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, serta Kelurahan Bontang Kuala dikenal dengan desa nelayan tradisional dan kuliner lautnya. Kelurahan Gunung Elai adalah pusat pendidikan dan permukiman, sementara Kelurahan Api-Api merupakan kawasan perumahan yang saat ini mulai berkembang (BPS, 2024).

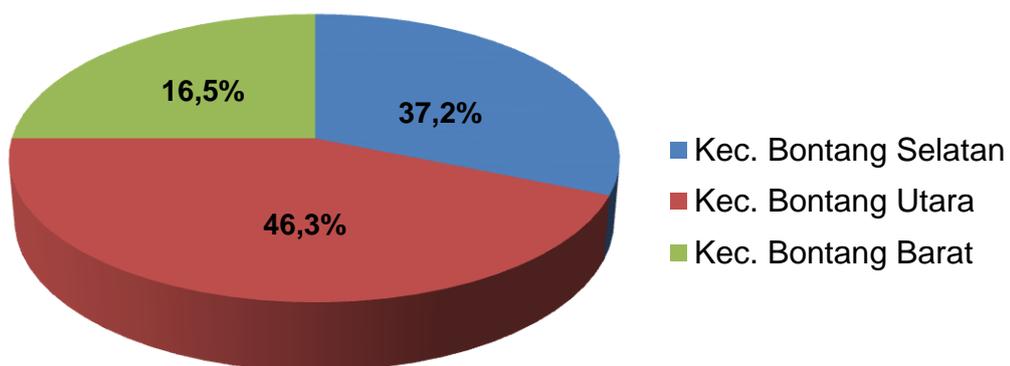
Kecamatan Bontang Selatan, seperti Kelurahan Satimpo dengan mencakup area perumahan dan industri ringan, sedangkan Kelurahan Berbas Pantai terkenal dengan pantai dan tempat wisata pesisirnya. Kelurahan Berbas Tengah, adalah pusat kegiatan sosial dan ekonomi, sementara Kelurahan Tanjung Laut, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan perhubungan laut. Kelurahan Tanjung Laut Indah, adalah daerah perumahan yang berkembang dengan cepat. Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Kanaan terkenal dengan lingkungan yang tenang dan permukiman baru, sedangkan Kelurahan Belimbing, memiliki berbagai fasilitas umum dan kawasan perumahan. Kelurahan Gunung Telihan menawarkan pemandangan alam yang indah dan pertanian yang subur.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang terutama dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional

yakni PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mencatat penduduk Kota Bontang pada triwulan pertama tahun 2024 sebanyak 190.621 jiwa. Penyebaran jumlah penduduknya pada tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Selatan sebesar 70.846 jiwa (37,2%), Kecamatan Bontang Utara adalah 88.306 jiwa (46,3%) dan di Kecamatan Bontang Barat 31.469 jiwa (16,5%).

**Gambar 2.5**  
**Jumlah Penduduk Semester I tahun 2024**



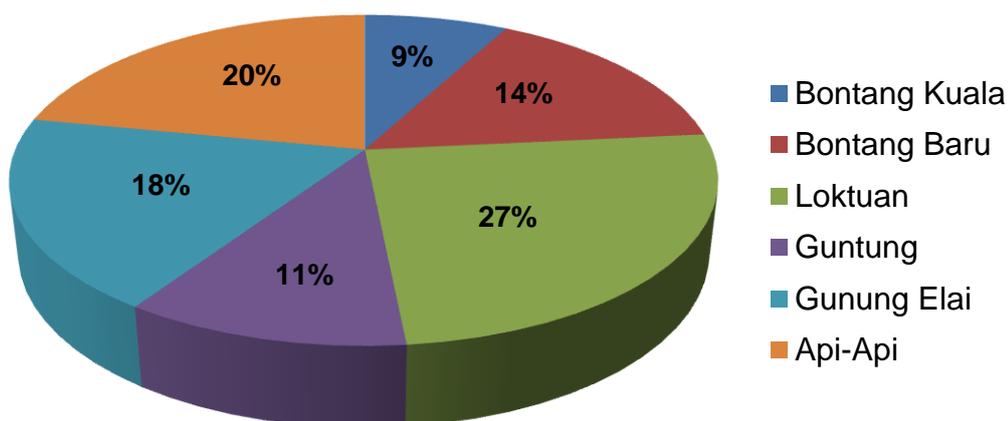
Kecamatan Bontang Utara dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Loktuan dimana jumlah penduduknya mencapai 21.131 jiwa dengan besar kontribusi kepadatan penduduk dalam Kecamatan mencapai 27%. Sedangkan jumlah penduduk terendah ada di Kelurahan Bontang Kuala yakni 7.636 jiwa dengan besar kontribusi kepadatan penduduk dalam Kecamatan mencapai 9%.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kota Bontang**  
**Kecamatan Bontang Utara**  
**Semester I Tahun 2024**

Kelurahan	KK	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa	%
Bontang Kuala	2.476	3.927	3.709	7.636	9
Bontang Baru	4.167	6.508	6.292	12.800	14
Lok Tuan	8.010	12.603	11.528	24.131	27
Guntung	3.239	5.192	4.842	10.034	11
Gunung Elai	4.986	8.129	7.526	15.655	18
Api-Api	5.711	9.274	8.776	18.050	20
<b>Jumlah</b>	<b>28.589</b>	<b>45.633</b>	<b>42.673</b>	<b>88.306</b>	<b>100</b>

Sumber: Disdukcapil, diolah, 2024.

**Gambar 2.6**  
**Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan**  
**Kec.Bontang Utara**



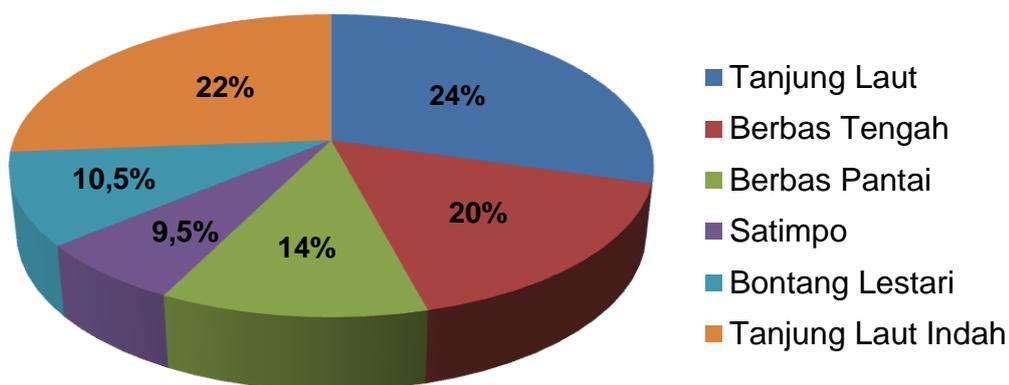
Kecamatan Bontang Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Tanjung Laut dimana jumlah penduduknya mencapai 16.865 jiwa dengan besar kontribusi kepadatan penduduk dalam Kecamatan mencapai 24%. Sedangkan jumlah penduduk terendah ada di Kelurahan Satimpo yakni 6.863 jiwa dengan besar kontribusi kepadatan penduduk dalam Kecamatan mencapai 9,5%.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Bontang**  
**Kecamatan Bontang Selatan**  
**Semester I Tahun 2024**

Kelurahan	KK	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa	%
Tanjung Laut	5.468	8.680	8.185	16.865	24
Berbas Tengah	4.792	7.391	7.056	14.447	20
Berbas Pantai	3.280	5.077	4.704	9.781	14
Satimpo	2.066	3.529	3.334	6.863	9,5
Bontang Lestari	2.411	3.973	3.412	7.385	10,5
Tanjung Laut Indah	5.083	8.021	7.484	15.505	22
<b>Jumlah</b>	<b>23.100</b>	<b>36.671</b>	<b>34.175</b>	<b>70.846</b>	<b>100</b>

Sumber: Disdukcapil, diolah, 2024.

**Gambar 2.7**  
**Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan**  
**Kec. Bontang Selatan**



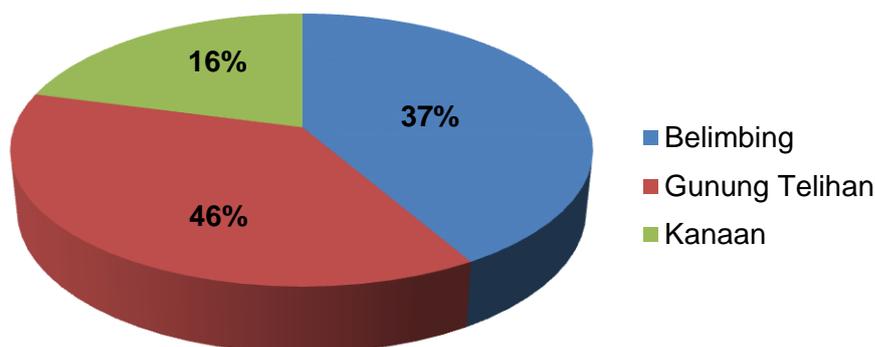
Kecamatan Bontang Barat dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Gunung Telihan dimana jumlah penduduknya mencapai 14.580 jiwa dengan besar kontribusi kepadatan penduduk dalam Kecamatan mencapai 46%. Sedangkan jumlah penduduk terendah ada di Kelurahan Kanaan yakni 5.189 jiwa dengan besar kontribusi kepadatan penduduk dalam Kecamatan mencapai 16%.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Kota Bontang**  
**Kecamatan Bontang Barat**  
**Semester I Tahun 2024**

Kelurahan	KK	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa	%
Belimbing	3.788	5.999	5.710	11.700	37
Gunung Telihan	4.690	7.560	7.020	14.580	46
Kanaan	1.724	2.697	2.492	5.189	16
<b>Jumlah</b>	<b>10.202</b>	<b>36.671</b>	<b>34.175</b>	<b>31.469</b>	<b>100</b>

Sumber: Disdukcapil, diolah, 2024

**Gambar 2.8**  
**Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan**  
**Kec. Bontang Barat**



Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (98.560 jiwa) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (92.061 jiwa). Hal ini berdampak pada besarnya rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Kota Bontang**  
**Semester I Tahun 2024**

Kelurahan	KK	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa	%
Bontang Utara	28.589	45.633	42.673	88.306	46
Bontang Selatan	23.100	36.671	34.175	70.846	37
Bontang Barat	10.202	16.256	15.213	31.469	17
<b>Jumlah</b>	<b>61.891</b>	<b>98.560</b>	<b>92.061</b>	<b>190.621</b>	<b>100</b>

Sumber: Disdukcapil, diolah, 2024

## **2. Data-Data Kemiskinan Kota Bontang**

### **a. Bidang Infrastruktur**

Infrastruktur memberikan kontribusi dalam melihat angka kemiskinan suatu daerah dengan indikator : Rumah Tidak Layak Huni/RTLH, akses air minum, indeks kualitas air minum dan sanitasi lingkungan (drainase, persampahan, air limbah domestik)

Pembangunan infrastruktur di Kota Bontang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menitikberatkan pada peningkatan akses sanitasi dan air minum, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah serta penguatan dalam upaya penanggulangan banjir. Dalam rangka meningkatkan akses air minum dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum, serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam penyediaan air minum.

Air baku yang dapat disediakan pada tahun 2021 sebesar 75,01% atau baru dapat memenuhi air baku sebesar 414,94 liter/detik dari kebutuhan air baku sebesar 553,19 liter/detik. Pemenuhan air baku sebesar 75,01% pada tahun 2021 telah meningkat 4,69% dibanding pemenuhan air baku pada tahun 2017 sebesar 70,32%. Meskipun mengalami peningkatan, pemenuhan untuk sumber air baku masih sangat bergantung pada air bawah tanah yang diambil melalui sumur dalam yang saat ini sudah mulai dibatasi penggunaannya, sehingga sumber air baku alternatif atau sumber air baku permukaan sangat diperlukan untuk Kota Bontang.

Persentase penduduk yang telah berakses air minum layak juga mengalami peningkatan dari 77,42% pada tahun 2019 meningkat menjadi 83,53% pada tahun 2021 atau meningkat

sebesar 6,11%. Sebanyak 154.864 jiwa penduduk Kota Bontang telah mendapatkan layanan air minum perpipaan baik yang dilakukan oleh PDAM maupun Non PDAM. Meskipun capaian kinerja mengalami peningkatan, namun kualitas dan kontinuitas penyediaan air masih perlu diperbaiki.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Taman Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, kepastian kualitas dan kontinuitas air belum dapat dipenuhi. Kualitas air belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disebabkan karena desain Instalasi Pengolah Air (IPA) yang dimiliki hanya mampu memproduksi air sampai kriteria air bersih saja dan kualitas air baku yang kurang baik dari air tanah. Kontinuitas distribusi air bersih belum dapat dilakukan selama 24 jam dan baru dapat dilakukan selama 18,55 jam per hari karena produksi air beberapa IPA yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan disebagian IPA produksi air dikondisikan bekerja diatas kapasitas terpasang sehingga untuk menjaga kinerja IPA jam operasi tidak dimaksimalkan 24 jam.

#### **b. Bidang Pendidikan**

Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting, yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusia. Sehingga pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam melihat angka kemiskinan suatu daerah melalui kualitas pendidikannya. Hal ini

dapat ditinjau dari aspek jumlah sekolah dan murid, lama menempuh pendidikan dan bantuan pendidikan baik dari pemerintah maupun CSR.

Di Kota Bontang, jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2024 pada setiap kecamatannya. Hanya sekolah swasta yang bertambah satu unit di semester 2022/2023 sehingga totalnya tetap 55 unit sekolah. Sedangkan jumlah guru di sekolah TK swasta menunjukkan angka yang cukup jauh yakni 344 di semester 2023/2024 sedangkan guru negeri hanya sekitar 9 orang. Adanya kebijakan yang mengatur terkait status guru TK menjadi penyebab terjadinya hal ini.

Pendidikan Dasar Sembilan tahun terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI menurun pada tahun 2021 menjadi 94,27 % dibanding tahun sebelumnya tahun 2020 yang mencapai 103,41%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI cenderung tetap pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 93,03 % dengan Angka Putus Sekolah (APS) sebesar 0% dan angka pendidikan yang ditamatkan sebesar 93%. Persentase pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 93,04 %,

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2021 tetap 102,26% dari tahun sebelumnya tahun 2020. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 82,47% dari tahun 2020 dengan capaian 80,27%. Dengan angka putus sekolah tahun 2021 sebesar 0% dan angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021 sebesar

90,55 %. Persentase Pendidik SMP/MTS berkualifikasi S1/D4 sebesar 96,88% pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2020 yang sebesar 86,15%.

Pelayanan urusan Pendidikan di bidang sarana bangunan gedung juga menjadi perhatian bersama. Untuk jenjang Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2021 sebesar 67,21%, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs realisasinya lebih baik, yaitu sebesar 78,79%. Selain itu, pendidikan formal menjadi penting dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bontang pada tahun 2020 mencapai 13,03 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 13,17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun yang masuk pendidikan formal pada tahun 2020 dan 2021 memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma I. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bontang ini menunjukkan pembangunan pendidikan pada tiap jenjang pendidikan sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan ketersediaan sekolah mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi di Kota Bontang.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bontang tahun 2021 terjadi peningkatan dengan capaian 10,80 tahun dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 10,79 tahun. RLS Kota Bontang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Bontang masih pada jenjang SLTA. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang masih perlu terus ditingkatkan. Berikut angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang umur di Kota Bontang.

**Tabel 2.6**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Bontang**

Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	2021	2022	2023
7-12	99.70	98.79	99.07
13-15	99.86	97.48	97.56
16-18	83.34	83.14	83.39
19-23	-	-	21.35

Sumber: BPS, Bontang dalam angka, 2024

Jika merujuk pada data di atas, maka dapat dilihat walaupun Harapan Lama Sekolah anak-anak usia sekolah di Kota Bontang sudah mencapai pendidikan Diploma 1, akan tetapi rata-rata anak-anak usia sekolah hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SLTA. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyak industri pengolahan yang berdiri di Kota Bontang mendorong anak-anak usia sekolah untuk segera bekerja membantu kehidupan orang tuanya.

Masyarakat di daerah pesisir yang berdasarkan data kemiskinan sebagian besar adalah merupakan masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut menjadi faktor pendukung masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Bontang. Masyarakat di pesisir lebih senang anaknya ikut pergi ke laut mencari ikan dari pada bersekolah, agar mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

**Tabel 2.7**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Bontang**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2021	2022	2023
SD/ sederajat	99.15	98.79	98.72
SMP/ sederajat	76.69	76.01	83.62
SMA sederajat	64.94	64.88	78.83

Sumber: BPS, Bontang dalam angka, 2023.

Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata menempuh pendidikan hingga jenjang SMU selama lebih dari 11 tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

### **c. Bidang Kesehatan**

Kesehatan memberikan kontribusi dalam melihat angka kemiskinan suatu daerah melalui kualitas kesehatannya. Hal ini dapat ditinjau dari aspek tenaga kesehatan, Sarana kesehatan dan penerima jaminan kesehatan. Menurut WHO jumlah dokter umum dibandingkan dengan jumlah penduduk ideal adalah 1 : 1.000 orang.

Rasio dokter per satuan penduduk tahun di Kota Bontang tahun 2020 mencapai 1 : 1.339 dan turun menjadi 1 : 736 di tahun 2021. Dengan demikian rasio jumlah dokter yang tersedia sudah sangat ideal. Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah dokter umum sejumlah 252 orang di tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 dokter umum yang tersedia hanya berjumlah 138 orang. Jika merujuk pada capaian rasio dokter per satuan penduduk, kondisi ketersediaan dokter di tahun 2021 sudah ideal dan perlu dipertahankan. Hingga pada tahun 2023, penambahan jumlah dokter di Kota Bontang tetap bertahan 120 Dokter Spesialis,

sedangkan dokter umum menurun dari 2018 tahun 2022 menjadi 213 orang tahun 2023 seperti diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Dokter Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan dan Jenis Tenaga Kedokteran di Kota Bontang**

Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tenaga Kedokteran Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan dan Jenis Tenaga Kedokteran (orang)											
	Dokter Spesialis			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Umum			Dokter Gigi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Puskesmas	0	0	0	-	-	0	29	35	32	14	7	12
Rumah Sakit dan Klinik	108	120	120	-	-	5	200	183	181	42	45	46
Total	108	120	120	-	-	5	229	218	213	56	52	58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2023

Tahun 2021 capaian rasio Puskesmas/Poliklinik/Puskesmas Pembantu adalah 1 : 3635. Rasio ini turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1 : 3623. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang mencapai jumlah 185,393 jiwa pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang hanya sejumlah 184.784 jiwa, sementara jumlah puskesmas/poliklinik/ puskesmas pembantu tidak ada penambahan yaitu sejumlah 51 unit. Sedangkan rasio rumah sakit per 100.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 1: 2,71 dan pada tahun 2021 turun menjadi 1:2,69. Artinya 1 buah rumah sakit digunakan untuk melayani lebih dari 200 ribu penduduk.

Kondisi yang sama terjadi pada capaian rasio tenaga medis persatuan penduduk dikali 1000. Pada tahun 2020 rasio tenaga medis mencapai 1 : 635 dengan tenaga medis berjumlah 291 orang dan pada tahun 2021 turun menjadi 1 : 411 dengan jumlah tenaga medis berjumlah 451 orang. Rasio jumlah tenaga medis ini menunjukkan bahwa 1 orang paramedis harus menangani 451 orang

pasien. Penurunan jumlah tenaga medis ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan layanan kesehatan dengan bertambahnya jumlah tenaga medis di Kota Bontang pada tahun 2021.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitasnya**

Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas Kesehatan (unit)								
	Rumah Sakit Umum			Rumah Sakit Khusus			Puskesmas Rawat Inap		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bontang Selatan	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Bontang Utara	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Bontang Barat	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Bontang	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Kecamatan	Puskesmas Non Rawat Inap			Klinik Pratama			Posyandu		
Bontang Selatan	3	3	3	4	4	6	44	44	44
Bontang Utara	2	2	2	8	9	9	54	55	55
Bontang Barat	1	1	1	1	1	3	21	22	22
Bontang	6	6	6	13	14	18	119	121	121

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari target 270 menjadi 467 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 16 kasus kematian ibu dari jumlah 3.405 kelahiran hidup. Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak langsung (penyakit menular covid19 sebanyak 11 kasus kematian) dan penyebab langsung berupa penyakit tidak menular, sebanyak 5 kasus kematian, terdiri atas 1 kasus eklamsia (komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan), 2 kasus gangguan *cardiac ares*, 1 kasus SLE atau *Systematic Lupus*

*Erythematosus* dan 1 kasus karena *chronic kidney disease* (CKD). Kondisi saat ini hanya terdapat 2 rumah sakit dari total 5 rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif* (PONEK) yaitu RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan menjadi 14,39 per 1.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan 15,49 . Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 49 kasus kematian bayi yang dilaporkan, terdiri dari kematian *neo natal* (berumur 0-28 hari) sebanyak 45 kasus dan kematian *post natal* (berumur 29 hari – 11 bulan) sebanyak 4 kasus dari jumlah 3.405 kelahiran hidup, 45 kasus *neo natal* yang disebabkan oleh 6 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 9 asfiksia, 2 infeksi, 13 penyakit bawaan (kelainan *kongenital*), premature 8, HIE 1, SIDS 1, tidak diketahui 1, imatur (lahir dengan umur kehamilan 23 minggu ada 2 , penyakit penyerta 1 serta anemia 1).

Capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang/*Underweight* (BB/U) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 7,03% dari target yang ditetapkan 5,37%. Pada tahun 2021 terdapat 460 balita gizi kurang dari total 6.540 balita seluruhnya yang ditimbang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: penyebab langsung selain karena memang capaian pemantauan pertumbuhan yang masih rendah (<60%), pengetahuan ibu dalam pemberian makan anak dan balita (PMBA) masih belum baik dan benar. Untuk penyebab tidak langsung, lingkungan rumah yang sebagian kontrak (sehingga tidak bisa diperbaiki/renovasi), sirkulasi udara tidak baik, ketersediaan

sanitasi, praktik pengasuhan anak yang kurang tepat dan/atau konsumsi makanan bergizi yang rendah.

Capaian indikator *Insiden Rate* (IR) DBD mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu 245,6 dan terealisasi sebesar 245,6 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 terdapat 591 kasus DBD dari total penduduk sebanyak 182.789 jiwa. Kota Bontang merupakan salah satu daerah endemis demam berdarah, dimana angka *Insiden Rate* DBD cenderung meningkat yang diakibatkan oleh faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan mobilitas penduduk yang diiringi oleh peningkatan sarana transportasi yang menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.

#### **d. Bidang Pariwisata dan UMKM**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2019 - 2023 dapat dilihat melalui indikator jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata yang dikelola. Secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bontang cenderung mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, kondisi ini ditengarai masih disebabkan oleh COVID-19 dengan ditutupnya objek wisata yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun dari 215.029 orang pada tahun 2020 menjadi 133.753 orang pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 271.617 yang terbagi sebanyak 1.450 jiwa wisatawan mancanegara dan 270.167 wisatawan domestik.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bontang**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Mancanegara</b>	<b>Wisatawan Domestik</b>	<b>Jumlah</b>
2019	168	421.920	422.088
2020	-	183.444	183.444
2021	-	133.753	133.753
2022	1.450	270.167	271.617
2023	39	287.195	287.234

*Sumber: BPS, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, 2024.*

Sementara untuk kegiatan promosi kunjungan wisata belum digiatkan kembali. Untuk akses jalan menuju kota Bontang sendiri dari kabupaten kota sekitar seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Samarida masih dalam kondisi kurang bagus sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan dari daerah sekitar untuk berkunjung ke Kota Bontang, sehingga kunjungan wisatawan lebih di dominasi oleh wisatawan lokal saja. Sementara dari sisi jumlah destinasi wisata mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan mancanegara jauh menurun hanya sekitar 39 jiwa dan berbanding terbalik dengan wisatawan domestic yang justru meningkat sebanyak 287.195 jiwa di tahun 2023.

Sektor pariwisata sangat berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peningkatan beberapa usaha penyedia makanan/minuman di Kota Bontang menunjukkan peningkatan yang cukup bagus. Tahun 2023 usaha *coffe shop* cenderung meningkat diangka 54 yang sebelumnya hanya 44 di tahun 2022 dan 35 pada tahun 2021. Sama halnya dengan restoran yang juga meningkat di tahun 2023 sejumlah 31, dimana tahun 2022 hanya sekitar 21 unit restoran. Sektor UMKM

memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), serta sumber ekspor non migas. Persentase Usaha Mikro dan Kecil tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar 99,62%. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 100%.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Usaha Penyediaan Makanan/Minuman Menurut Jenis Usaha di Kota Bontang**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Restoran	7	10	13	21	31
Cafetaria	6	6	6	7	14
Kantin	-	-	-	-	-
Coffeshop	-	27	35	44	54
Pub/bar	-	-	-	-	-
Warung/kedai makan/ rumah makan	251	238	250	323	265

*Sumber: BPS, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, 2024.*

Indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 tercatat sebesar 94,87% dengan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2021 mengalami tingkat penurunan menjadi 83,95% karena hal ini sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Selama tahun 2023, koperasi di Kota Bontang mempunyai volume usaha sebesar Rp 275.448.441,46, dengan modal sebesar Rp 219.723.574,38, dan mendapatkan sisa hasil usaha sebesar Rp 24.594.679,92.

Jumlah koperasi seperti KPRI, KOPKAR dan Koperasi lainnya sangat tinggi di Kecamatan Bontang Utara yaitu KPRI 18, KOPKAR 7 dan Koperasi lainnya 26 unit. Berdasarkan data BPS 2024 jumlah koperasi aktif menurut Kecamatan di Kota Bontang

dalam kurung waktu lima tahun mengalami fluktuasi bahkan stagnan.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Bontang**

<b>Kecamatan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bontang Selatan	37	21	22	23	22
Bontang Utara	59	46	47	48	49
Bontang Barat	15	11	12	12	12
<b>Bontang</b>	<b>111</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

*Sumber: BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang, 2024.*

Kelompok usaha koperasi menurut kecamatan di Kota Bontang di dominasi oleh koperasi konsumen dengan total 45 unit yang terfokus di Kecamatan Bontang Utara. Selanjutnya terbanyak kedua terdapat pada Kecamatan Bontang Selatan sejumlah 19 dan di Kecamatan Bontang Barat berjumlah 9 unit. Keberadaan banyak koperasi konsumen di Kota Bontang adalah hasil dari interaksi dinamis antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Industri besar menyediakan basis ekonomi yang kuat, sementara komitmen terhadap pemberdayaan lokal dan solidaritas komunitas mendorong partisipasi aktif dalam koperasi. Faktor-faktor ini, ditambah dengan dukungan pemerintah yang konsisten, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi koperasi konsumen untuk berkembang di Kota Bontang (Kemenkop UKM, 2023).

Faktor yang mempengaruhi Kota Bontang memiliki banyak koperasi konsumen yang berkembang, didorong oleh beberapa faktor kunci. Salah satu faktor utama adalah kehadiran industri besar seperti PT Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG, yang merupakan pilar utama ekonomi Kota Bontang. Industri-industri ini menyediakan ribuan lapangan kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pembentukan koperasi konsumen.

Karyawan dari industri-industri ini sering mendirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan cara yang lebih efisien dan terorganisir. Koperasi ini memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui pembelian bersama dan distribusi yang lebih efektif.

Dari perspektif geografis, letak Bontang yang relatif terpencil di Kalimantan Timur menciptakan tantangan logistik yang signifikan. Koperasi konsumen mampu mengatasi sebagian dari tantangan ini dengan mengorganisir pembelian bersama dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, yang memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bagi anggotanya. Hal ini sangat relevan di daerah-daerah yang mungkin tidak terlayani dengan baik oleh jaringan ritel besar, membuat koperasi konsumen menjadi solusi penting untuk mengatasi kesulitan distribusi dan memastikan suplai yang stabil (Pemerintah Kota Bontang, 2023)

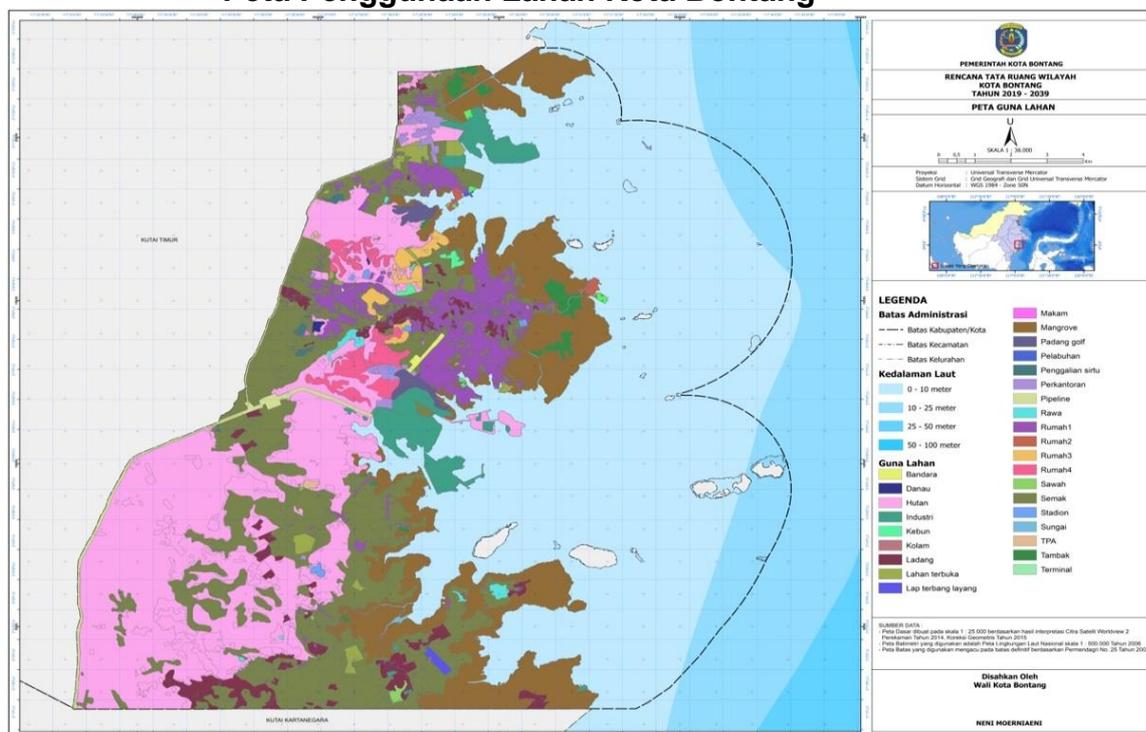
#### **e. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Penguatan ketahanan pangan di Kota Bontang memiliki dampak langsung pada penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Dengan meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan pertanian, serta memperluas industri pengolahan hasil laut dan pertanian, Kota Bontang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Ini sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Misalnya, peningkatan budidaya perikanan dan pengembangan industri pengolahan hasil laut tidak hanya menyediakan pekerjaan bagi

nelayan tetapi juga bagi pekerja di sektor pengolahan dan distribusi.

Selain itu, akses terhadap makanan yang beragam dan bergizi membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, yang merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke sumber pangan yang stabil dan terjangkau, mereka cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung penguatan sektor pertanian dan perikanan di Kota Bontang tidak hanya akan meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga secara signifikan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran di kota ini.

**Gambar 2.9**  
**Peta Penggunaan Lahan Kota Bontang**



Sumber: <https://simpatiku.bontangkota.go.id/peta>, diakses Juli 2024.

Kota Bontang menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan sektor pertanian tanaman pangan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kota Bontang memiliki 37 hektar lahan sawah non irigasi dimana 97,30% terletak di Kecamatan Bontang Selatan. Selain itu, terdapat lahan tegal/kebun seluas 891 hektar dan ladang seluas 1.620 hektar. Pertanian padi hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Barat, dengan luas panen padi sawah sebesar 24 hektar. Meskipun Bontang adalah kota dengan karakteristik perkotaan yang dominan, masih terdapat upaya mempertahankan dan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada.

Pertanian di Kota Bontang menghadapi beberapa kendala utama seperti adanya keterbatasan lahan akibat urbanisasi dan ketergantungan pada pasokan bahan pangan dari daerah lain. Lahan pertanian yang sempit dan berada di tengah tekanan perkembangan kota sering kali dikonversi untuk keperluan non pertanian, yang berdampak pada menurunnya luas lahan yang dapat diusahakan untuk tanaman pangan. Selain itu, lahan sawah yang ada tidak didukung oleh sistem irigasi, sehingga sangat bergantung pada curah hujan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam produksi padi dan berkontribusi pada rendahnya hasil panen. Kondisi ini menyebabkan Kota Bontang harus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, yang berisiko mengganggu ketahanan pangan lokal terutama jika terjadi gangguan pada rantai pasokan.

Ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut yang berkontribusi pada

penanggulangan kemiskinan ekstrem serta pengangguran di Kota Bontang. Salah satu solusi adalah pengembangan pertanian perkotaan dengan memanfaatkan teknologi modern seperti hidroponik dan aeroponik, yang memungkinkan budidaya tanaman tanpa memerlukan lahan yang luas. Pertanian vertikal dan pemanfaatan atap bangunan untuk lahan pertanian juga dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Selain itu, optimalisasi penggunaan lahan tegal/kebun dan ladang dengan menanam tanaman bernilai ekonomis tinggi bisa menjadi strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Diversifikasi tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan non irigasi dan iklim setempat dapat membantu dalam mencapai stabilitas produksi dan pendapatan petani.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran, pengembangan sektor pertanian dapat memainkan peran penting. Pertanian yang efisien dan inovatif dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Program pelatihan dan penyuluhan pertanian untuk warga Kota Bontang dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola pertanian modern, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam industri pertanian perkotaan yang sedang berkembang. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian dapat berkontribusi pada stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan lokal, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi beban ekonomi pada kelompok masyarakat yang rentan.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, beberapa tanaman

hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarma memiliki produksi yang cukup besar di daerah ini. Produksi hortikultura yang menonjol ini menawarkan peluang untuk mendukung ketahanan pangan lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuka lapangan kerja, yang semuanya berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran di Kota Bontang.

Produksi sayur-sayuran di Kota Bontang selama tahun 2023 menunjukkan hasil produksi yang cukup baik. Kangkung merupakan sayuran dengan produksi tertinggi sebesar 912 kuintal, diikuti oleh sawi dengan produksi 838 kuintal, dan tomat sebanyak 826 kuintal. Produksi sayur-sayuran ini menunjukkan adanya potensi yang baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan bahkan mungkin untuk pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tegal/kebun dan ladang yang ada, produksi sayur-sayuran ini dapat ditingkatkan. Pertanian sayuran yang intensif dan efisien bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dan membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan sayuran dari luar daerah. Ini tidak hanya penting untuk stabilitas ekonomi lokal tetapi juga dapat berperan dalam mengurangi biaya pangan bagi penduduk, yang dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

Di sektor buah-buahan, mangga adalah buah dengan produksi tertinggi di Kota Bontang selama tahun 2023, mencapai 2.124 kuintal. Disusul oleh durian dengan 1.865 kuintal dan pisang dengan 1.274 kuintal. Produksi buah-buahan ini dapat menjadi peluang besar untuk pengembangan ekonomi lokal. Buah-buahan

tidak hanya memiliki nilai jual yang tinggi tetapi juga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk-produk bernilai tambah seperti jus, selai, atau makanan olahan lainnya, yang dapat membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, tanaman biofarmaka seperti jahe, kencur, kunyit, lengkuas, temulawak, jeruk nipis, dan serai juga tumbuh di Kota Bontang, meskipun dengan luas panen yang relatif kecil. Jeruk nipis mencatatkan produksi tertinggi di antara tanaman biofarmaka, yaitu sebesar 5.196 kg. Biofarmaka memiliki potensi yang signifikan dalam industri kesehatan dan kosmetik, yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pengolahan dan produksi produk herbal atau bahan baku untuk industri farmasi.

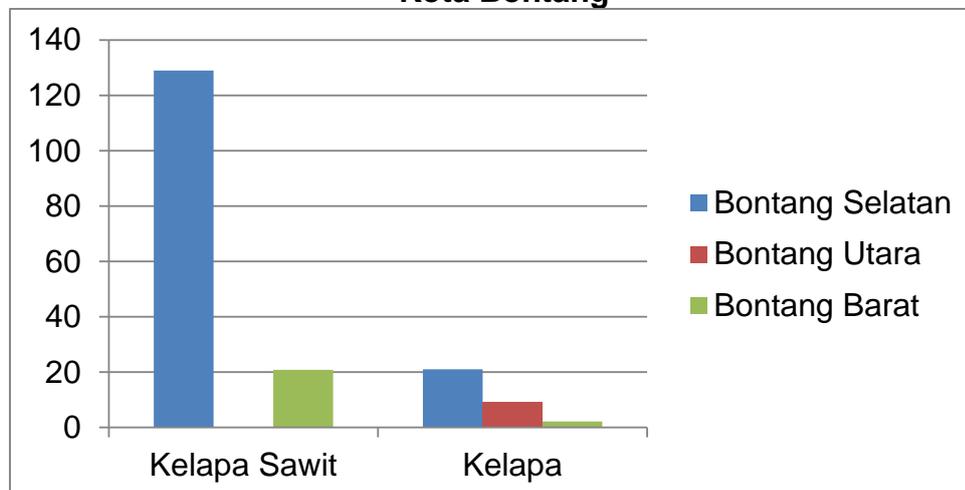
Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi komoditi perkebunan dengan produksi terbesar di Kota Bontang, mencapai 159,50 ton dari area seluas 51 hektar. Selain itu, komoditi kelapa juga menunjukkan produksi yang signifikan sebesar 32,24 ton, meskipun mencakup area yang sangat luas. Perkebunan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam perekonomian lokal tetapi juga berpotensi sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Bontang.

Produksi kelapa sawit dan kelapa yang signifikan di Kota Bontang menunjukkan adanya peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan berbasis perkebunan. Kelapa sawit, misalnya, dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak sawit, biodiesel, dan berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Sementara itu, kelapa bisa diolah menjadi minyak kelapa, serat kelapa, dan produk turunannya

seperti santan dan *desiccated coconut*. Pengembangan industri pengolahan ini dapat membuka banyak lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal, yang secara langsung berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran, optimalisasi sektor perkebunan di Kota Bontang memegang peranan penting. *Pertama*, pengelolaan perkebunan yang lebih efisien dan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. *Kedua*, pengembangan industri pengolahan produk perkebunan dapat menambah nilai produk dan menciptakan lebih banyak peluang kerja, baik di sektor hulu maupun hilir. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan bagi petani serta pekerja di industri perkebunan dapat meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam industri ini. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit dan kelapa dapat menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Bontang.

**Gambar 2.10**  
**Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kota Bontang**



Sumber: Kota Bontang dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, sektor peternakan di Kota Bontang menunjukkan potensi yang signifikan dengan dominasi populasi ternak babi sebanyak 2.117 ekor, di ikuti oleh sapi potong 568 ekor, kerbau 39 ekor, kuda 2 ekor, dan domba 138 ekor. Selain itu, populasi unggas seperti ayam kampung mencapai 104.502 ekor dan itik sebanyak 2.648 ekor. Keberagaman dan jumlah populasi ternak ini menandakan peluang besar untuk pengembangan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi dalam pengelolaan ternak. Ternak babi, sebagai komoditas utama memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam memenuhi permintaan lokal dan pasar eksternal. Begitu juga dengan sapi potong dan domba, yang selain sebagai sumber daging penting, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sektor peternakan di Kota Bontang memiliki dampak positif yang nyata dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Diversifikasi produk ternak

dan peningkatan efisiensi pemeliharaan dapat meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan peluang kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal. Selain itu, populasi unggas yang besar, terutama ayam kampung tidak hanya menyediakan sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat lokal tetapi membuka peluang untuk industri pengolahan produk unggas yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, pengembangan sektor peternakan dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan stabilitas ekonomi, dan menyediakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi penduduk Kota Bontang.

Kota Bontang memiliki keunggulan geografis yang signifikan dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan, menjadikannya pusat penting bagi sektor perikanan. Pada tahun 2023, produksi perikanan di Kota Bontang didominasi oleh perikanan budidaya laut dengan total produksi mencapai 3.510,49 ton. Ini jauh melampaui hasil dari budidaya tambak yang sebesar 13,36 ton dan budidaya kolam yang mencapai 38,38 ton. Produksi perikanan budidaya secara keseluruhan di Kota Bontang mencapai 3.562,23 ton. Keberhasilan dalam produksi perikanan laut ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Perikanan di Kota Bontang berperan krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran. *Pertama*, peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk perikanan dapat meningkatkan pendapatan bagi nelayan dan petani ikan, yang

banyak di antaranya berada dalam kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Budidaya perikanan laut, yang menyumbang mayoritas produksi, membuka peluang besar untuk investasi dan pengembangan industri pengolahan hasil laut, yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru. *Kedua*, potensi budidaya tambak dan kolam, meskipun masih kecil, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal dan diversifikasi ekonomi.

Pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan juga berkontribusi pada ketahanan pangan dengan menyediakan sumber protein yang terjangkau dan bernutrisi bagi masyarakat Kota Bontang. Ini penting dalam konteks pengurangan kemiskinan, karena akses terhadap makanan bergizi adalah salah satu komponen kunci kesejahteraan. Dengan implementasi teknologi budidaya yang canggih, pelatihan bagi nelayan dan petani ikan, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sektor perikanan di Kota Bontang dapat menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menunjukkan bahwa meskipun sektor tanaman pangan tidak terlalu menonjol, Kota Bontang memiliki keunggulan komparatif dalam perikanan dan beberapa subsektor lainnya. Produksi perikanan budidaya laut yang dominan, ditambah dengan kontribusi dari sektor perkebunan dan peternakan, menjadi penopang penting bagi ketahanan pangan di kota ini.

### 1) Perikanan sebagai pilar utama ketahanan pangan

Produksi perikanan budidaya laut di Kota Bontang yang mencapai 3.510,49 ton pada tahun 2023 menjadi kontributor utama dalam pasokan pangan lokal. Laut yang luas memungkinkan Kota Bontang untuk menghasilkan produk laut dalam jumlah besar, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan protein bagi penduduk lokal tetapi juga membuka peluang untuk ekspor ke pasar yang lebih luas. Hal ini mengurangi ketergantungan Kota Bontang pada impor bahan pangan dari luar daerah dan mendukung ketahanan pangan lokal. Pengembangan perikanan laut dan budidaya dapat mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan dan industri pengolahannya.

### 2) Diversifikasi produk pertanian dan peternakan

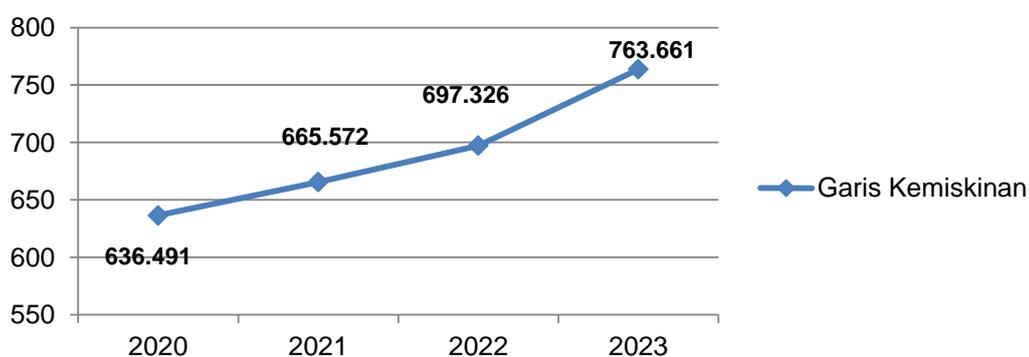
Meskipun kontribusi tanaman pangan di Kota Bontang relatif kecil, diversifikasi dalam produk hortikultura dan peternakan membantu memperkuat ketahanan pangan. Produksi hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, meskipun tidak terlalu besar dalam skala nasional, penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat lokal. Selain itu, populasi ternak yang cukup signifikan, termasuk sapi, babi, dan unggas, menambah variasi sumber protein yang tersedia bagi penduduk. Sektor peternakan ini juga menyediakan peluang ekonomi penting bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

## B. Kondisi Umum Kemiskinan Kota Bontang

### 1. Garis Kemiskinan

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir garis kemiskinan yang ada di Kota Bontang mengalami peningkatan dalam rupiah/kapita/bulan. Tahun 2020 garis kemiskinan ditentukan sebesar Rp 636.491 /kapita/ bulan. Mengalami peningkatan sebesar Rp 29.081 tahun 2021 sehingga menjadi 665.572/kapita/bulan. Tahun berikutnya ukuran garis kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 31.754 tahun 2022 dan Rp 66.335 tahun 2023. Artinya garis kemiskinan tahun 2022 mencapai Rp 697.326/kapita/bulan dan tahun 2023 mencapai Rp 763.661/kapita/bulan

**Gambar 2.11**  
**Garis Kemiskinan/Rupiah/Kapita/Bulan**

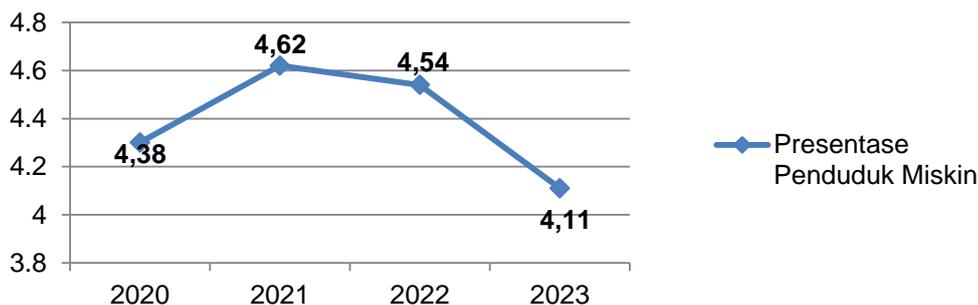


### 2. Presentase Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir presentase penduduk miskin yang ada di Kota Bontang telah berkisar di angka 4. Tahun 2020 presentase penduduk miskin mencapai 4,38%, meningkat sebesar 0,24 sehingga mencapai 4,62% tahun 2021 dari total penduduk Kota Bontang 185.393 jiwa. Presentase kemiskinannya mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,08% sehingga capaian kemiskinannya 4,54% dari total penduduk Kota Bontang

186.137 jiwa. Demikian pula di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.43%, artinya capaian presentase kemiskinannya hanya berkisar 4,11% dari total penduduk Kota Bontang 189.968 jiwa

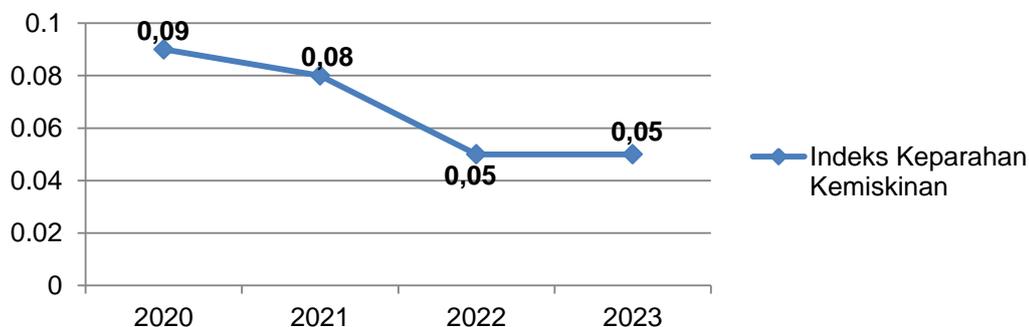
**Gambar 2.12**  
**Presentase Penduduk Miskin**



### 3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan yang ada di Kota Bontang mengalami penurunan. Tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,09 turun sebesar 0,01 tahun 2021 menjadi 0,08. Hal ini menandakan bahwa dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil akibat pasca pandemi covid-19 pemerintah Kota Bontang berhasil menurunkan indeks keparahan kemiskinan tersebut. Penurunan angka kemiskinan ini terus berlanjut di tahun 2022 dan tahun 2023 dengan penurunan indeks keparahan kemiskinan turun 0,03 atau capaian indeks keparahan kemiskinannya berkisar 0,05

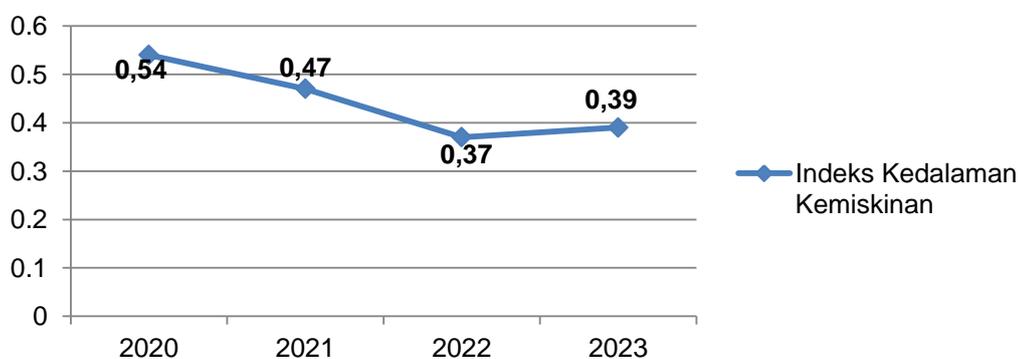
**Gambar 2.13**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan**



#### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bontang mengalami penurunan. Tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,54 turun sebesar 0,07 tahun 2021 menjadi 0,47. Hal ini menandakan bahwa dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil akibat pasca pandemi covid-19 pemerintah Kota Bontang berhasil menurunkan indeks kedalaman kemiskinan tersebut. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan terus berlanjut di tahun 2022 sebesar 0,10 sehingga besarnya mencapai 0,37. Namun tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan kembali meningkat sebesar 0,02 tahun 2023 atau berkisar 0,39

**Gambar 2.14**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan**



Berdasarkan garis kemiskinan, di Kota Bontang pada tahun 2021 sebesar Rp.665.572,- per kapita per bulan, maka sekitar 4,62% penduduk Bontang terkategori miskin pada tersebut. Angka penduduk miskin menurun pada tahun 2022 sekitar 0,08% yaitu menjadi 4,54% dengan garis kemiskinan sebesar Rp697.326 per kapita per bulan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan 0,43% menjadi 4,11% dengan garis kemiskinan sebesar Rp 763.661 per kapita per bulan. Dari angka ini terlihat ketimpangan pendapatan yang cukup rendah.

Berdasarkan indeks keparahan kemiskinan dan Indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bontang mengalami penurunan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Hal ini menandakan jarak antara pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan semakin dekat dengan garis kemiskinan di Kota Bontang. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang mampu memberikan efek sehingga perlu peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Dari beberapa kegiatan dan upaya penanggulangan kemiskinan Kota Bontang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita per bulan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari Rp. 697.326 menjadi Rp. 763.661. Angka ini menunjukkan adanya penurunan persentase kemiskinan dari 4,54% menjadi 4,11%. Namun, berbeda jika kita melihat indeks kedalaman kemiskinan yang sedikit mengalami peningkatan dari 0,37% menjadi 0,39%. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan bertahan pada angka yang tetap yaitu 0,05%.

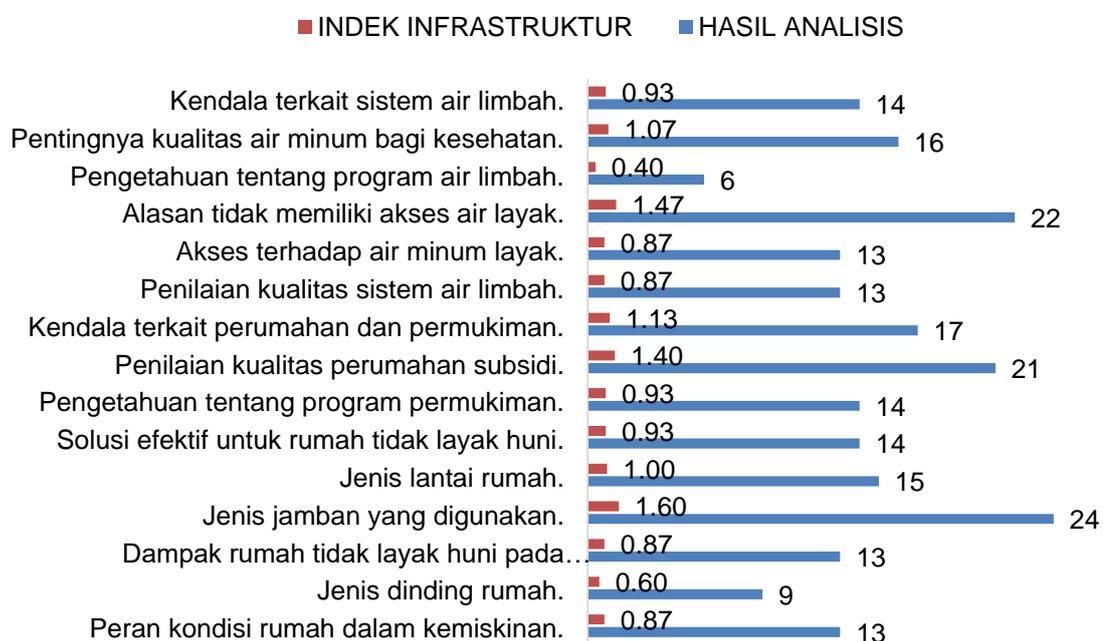
Data di atas menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang yang disertai dengan peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan stabilnya indeks keparahan kemiskinan, mengindikasikan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks.

Untuk mengatasi fenomena penurunan angka kemiskinan yang disertai dengan peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang tetap di Kota Bontang, diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terfokus. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan harus mencakup pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, yang tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang paling rentan.

## C. Distribusi Kemiskinan Berdasarkan Wilayah

### 1. Kelurahan Tanjung Laut

**Gambar 2.15**  
**Analisis infrastruktur di Kelurahan Tanjung Laut**



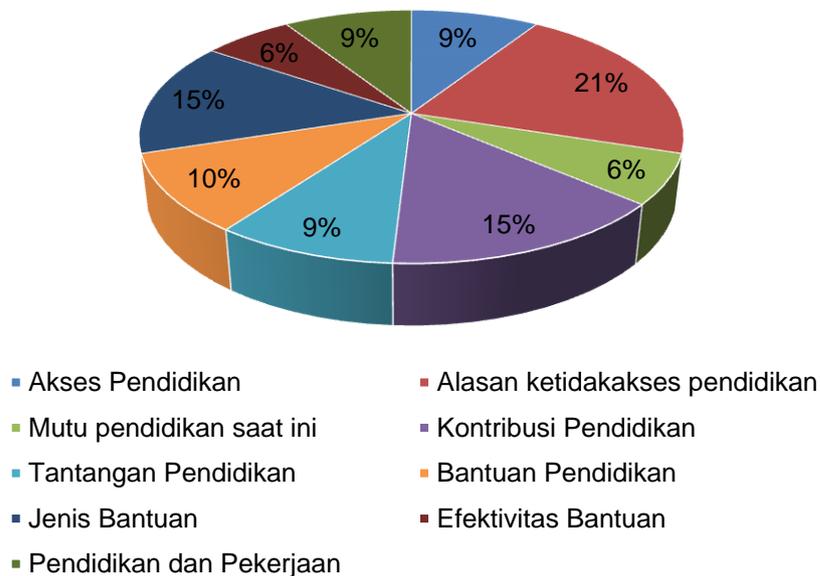
Hasil analisis menunjukkan hubungan yang kuat antara kondisi infrastruktur perumahan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang. Secara umum, kualitas

infrastruktur yang rendah, seperti rumah tidak layak huni, keterbatasan akses terhadap air bersih, dan kondisi sanitasi yang kurang memadai, dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial, serta memicu siklus kemiskinan.

Secara keseluruhan, infrastruktur perumahan yang buruk memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumah layak huni, akses air bersih, dan sanitasi yang memadai bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga faktor penting yang berperan dalam memutus siklus kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan infrastruktur dasar, terutama yang terkait dengan perumahan, air bersih, dan pengelolaan limbah, perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Pemerintah dan pihak terkait harus memprioritaskan investasi pada infrastruktur ini sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Indeks infrastruktur dalam data ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi area yang paling membutuhkan intervensi. Indeks tinggi menunjukkan kondisi yang relatif baik dan mungkin tidak memerlukan intervensi mendesak, sementara indeks rendah mengindikasikan bahwa perlu ada upaya perbaikan yang lebih cepat dan signifikan. Dengan memfokuskan sumber daya pada aspek dengan indeks infrastruktur rendah, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bontang.

**Gambar 2.16**  
**Analisis Kualitas Pendidikan di Kelurahan Tanjung Laut**

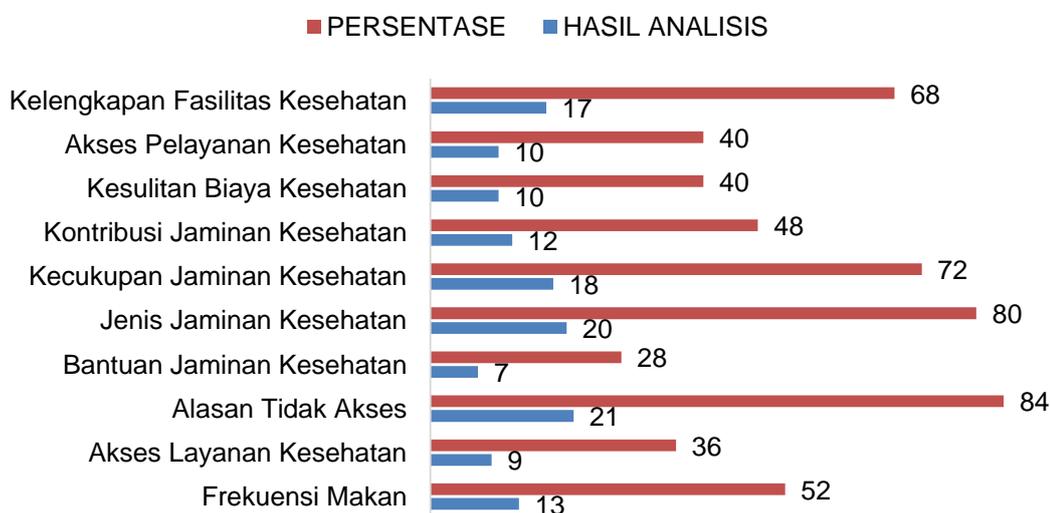


Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, meskipun berbagai tantangan tetap dihadapi. Akses pendidikan yang layak masih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, dengan biaya pendidikan yang tinggi sering kali menjadi penghalang utama. Persepsi terhadap mutu pendidikan saat ini cenderung negatif, mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersedia. Meskipun ada keyakinan bahwa pendidikan dapat berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, tantangan biaya tetap menjadi isu sentral.

Bantuan pendidikan yang diterima oleh sebagian responden menunjukkan adanya dukungan, tetapi efektivitas bantuan ini perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih besar. Program beasiswa pendidikan menjadi salah satu jenis bantuan yang paling diterima, namun masih ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan bantuan tersebut. Keyakinan bahwa pendidikan dapat

meningkatkan kesempatan kerja mencerminkan harapan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat membawa manfaat langsung bagi pendapatan individu di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memperluas program bantuan, guna mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

**Gambar 2.17**  
**Analisis Kualitas Kesehatan di Kelurahan Tanjung Laut**

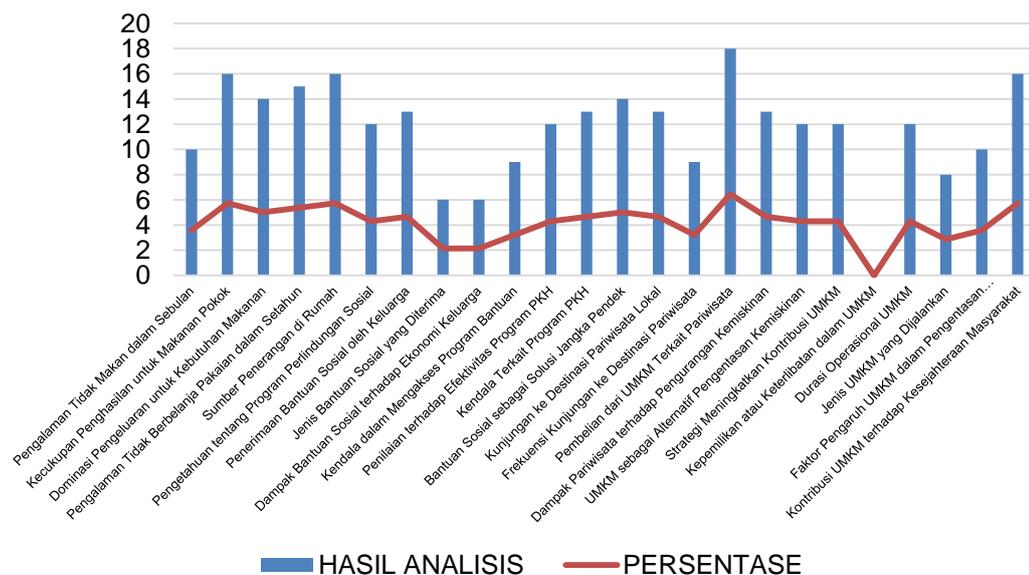


Hasil analisis kualitas kesehatan di Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Frekuensi makan yang rendah mencerminkan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, yang dapat berkontribusi pada masalah kesehatan dan berpengaruh pada produktivitas masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan, jarak yang jauh menuju fasilitas kesehatan tetap menjadi penghalang utama bagi banyak individu, yang menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah tersebut.

Ketersediaan jaminan kesehatan, khususnya melalui program BPJS, memberikan dukungan bagi masyarakat, namun masih ada tantangan terkait dengan kecukupan dan efektivitas jaminan tersebut. Meskipun banyak yang merasa jaminan kesehatan cukup memadai, terdapat kesulitan biaya pengobatan yang dialami oleh sebagian masyarakat, yang menunjukkan bahwa masalah finansial masih menjadi kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.

Kondisi fasilitas kesehatan juga menunjukkan bahwa meskipun ada peralatan yang memadai di beberapa tempat, masih ada kekurangan yang perlu diatasi. Semua faktor ini saling terkait dan berdampak langsung pada kondisi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Laut. Oleh karena itu, intervensi yang menyeluruh dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

**Gambar 2.18**  
**Analisis Sosial Ekonomi di Kelurahan Tanjung Laut**



Hasil analisis data sosial ekonomi memberikan gambaran yang penting mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Laut. Mayoritas masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekurangan pangan dalam sebulan terakhir, yang menunjukkan bahwa akses mereka terhadap makanan pokok relatif stabil. Kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok juga menunjukkan hasil yang positif, meskipun beberapa responden mengindikasikan adanya dominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan, yang dapat menjadi indikator ketahanan ekonomi yang rentan.

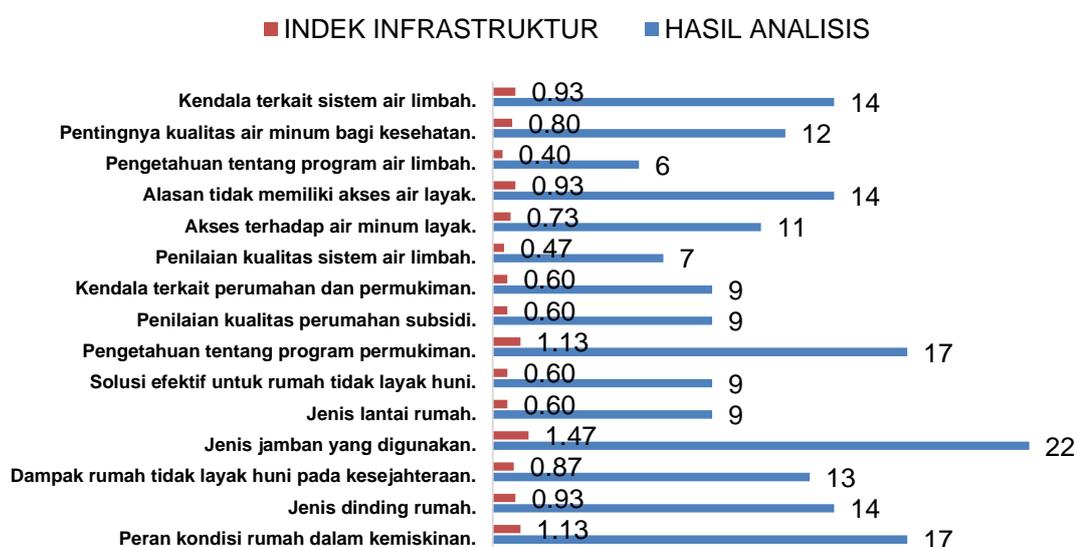
Berkaitan dengan akses terhadap layanan sosial, terdapat kesadaran yang rendah mengenai program perlindungan sosial di kalangan masyarakat, dengan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui program tersebut. Meskipun demikian, ada indikasi bahwa bantuan sosial yang diterima dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi keluarga. Namun, kendala dalam mengakses informasi tentang program bantuan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata lokal menunjukkan potensi untuk mendukung pengurangan kemiskinan. Masyarakat yang mengunjungi destinasi pariwisata dan bertransaksi dengan UMKM setempat mencerminkan adanya interaksi positif antara pariwisata dan ekonomi lokal. Masyarakat melihat peran UMKM sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan, dengan banyak yang setuju bahwa meningkatkan kontribusi UMKM dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, ada peluang yang signifikan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

melalui pendidikan dan akses terhadap informasi yang lebih baik mengenai program sosial.

## 2. Kelurahan Api-Api

**Gambar 2.19**  
**Analisis Infrastruktur Kelurahan Api-Api**



Berdasarkan hasil analisis kuisisioner pada variabel infrastruktur di Kelurahan Api-Api, Kota Bontang, terdapat beberapa poin penting yang bisa menjadi acuan untuk merencanakan aksi penanggulangan kemiskinan. Indeks Infrastruktur menunjukkan bahwa kondisi perumahan dianggap sangat penting dalam konteks kemiskinan (indeks 1.13), dimana jenis dinding dan lantai rumah yang telah diplaster memiliki nilai indeks yang relatif rendah (0.93 dan 0.60), menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perumahan.

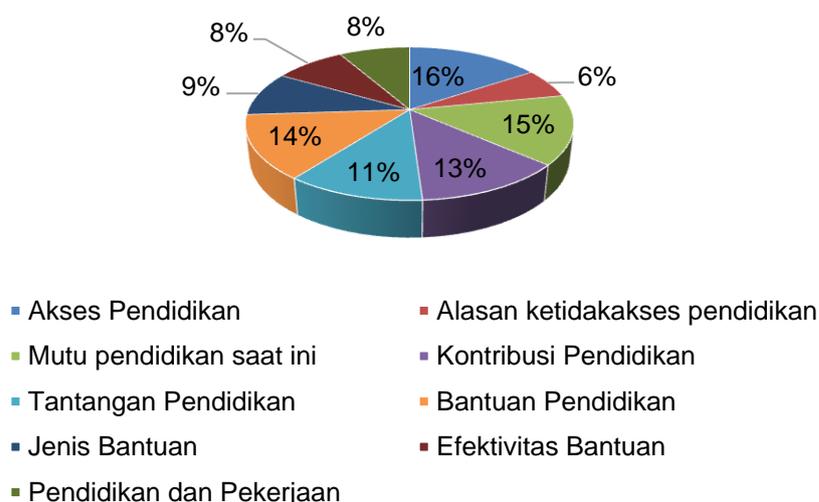
Dampak dari rumah yang tidak layak huni diidentifikasi berisiko pada kesehatan, dengan indeks 0.87. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam perumahan dan permukiman mencakup kurangnya sanitasi (0.60), serta akses air bersih yang terbatas, yang disebabkan oleh tidak adanya

sumber air terdekat (indeks 0.93). Hal ini menjadi tantangan signifikan mengingat pentingnya akses air layak bagi kesehatan (indeks 0.80).

Pengetahuan masyarakat terhadap program perumahan dan permukiman tergolong cukup baik (1.13), namun pengetahuan terkait program air limbah rendah (0.40). Sementara itu, solusi yang dianggap efektif untuk perbaikan rumah tidak layak huni adalah bantuan pemerintah dalam bentuk renovasi atau pembangunan rumah dengan indeks yang cukup rendah (0.60), menunjukkan bahwa bantuan tersebut mungkin belum merata atau belum mencukupi.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan infrastruktur, terutama dalam hal sanitasi, air bersih, dan kualitas perumahan, menjadi prioritas utama. Dukungan dalam bentuk program perbaikan infrastruktur dan edukasi terkait sanitasi dan air limbah juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Gambar 2.20**  
**Analisis Kualitas Pendidikan Kelurahan Api-Api**



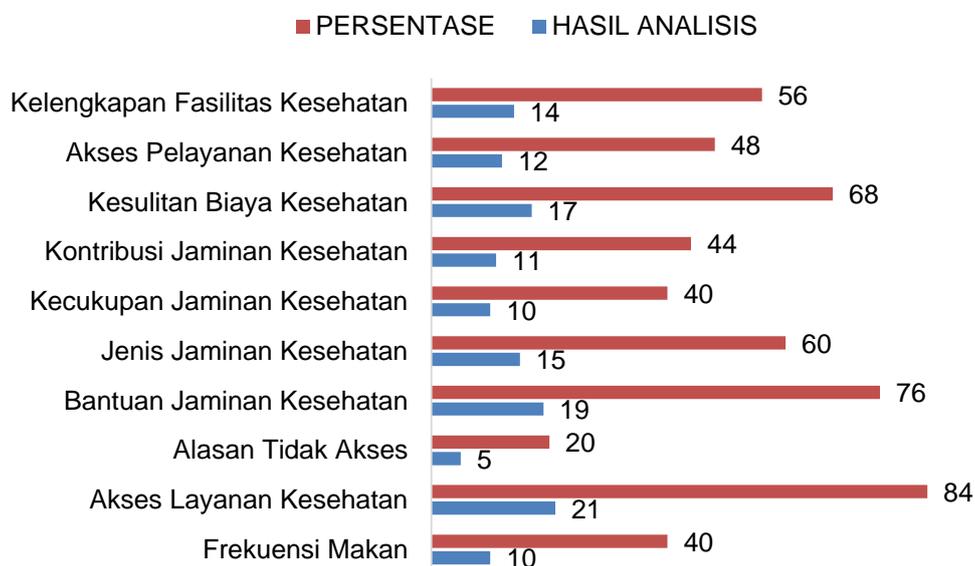
Berdasarkan hasil analisis kuisisioner terkait kualitas pendidikan di Kelurahan Api-Api, Kota Bontang, terdapat beberapa temuan utama yang dapat menjadi acuan untuk rencana penanggulangan kemiskinan melalui

peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pertama, sebagian besar responden memiliki akses terhadap pendidikan (15,63%), namun hambatan utama yang mereka hadapi adalah biaya pendidikan yang tinggi (11,46%), baik sebagai alasan ketidakmampuan mengakses pendidikan (6,25%) maupun sebagai tantangan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terbuka, masih ada beban biaya yang membatasi pemanfaatan pendidikan secara optimal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari segi mutu pendidikan, responden menilai pendidikan saat ini sudah baik (14,58%), dan kontribusi pendidikan bagi kehidupan mereka sangat besar (12,50%). Ini menunjukkan bahwa pendidikan diakui sebagai faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peluang kerja, sebagaimana tercermin dari keyakinan masyarakat bahwa pendidikan berhubungan erat dengan pekerjaan (8,33%). Namun, bantuan pendidikan yang ada (13,54%) sebagian besar dalam bentuk buku dan alat tulis (9,38%), dan efektivitas bantuan ini dianggap cukup efektif (8,33%).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan akses pendidikan dapat menjadi strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Api-Api. Meskipun akses sudah tersedia, faktor biaya masih menjadi kendala utama, sehingga perlu adanya intervensi yang lebih menyeluruh, seperti bantuan biaya pendidikan atau subsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah. Program bantuan yang lebih bervariasi dan terfokus pada aspek-aspek yang menunjang keterjangkauan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan biaya transportasi, juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

**Gambar 2.21**  
**Analisis Kualitas Kesehatan Kelurahan Api-Api**



Berdasarkan hasil analisis terkait kualitas kesehatan di Kelurahan Api-Api, Kota Bontang, terdapat beberapa temuan penting yang dapat menjadi dasar untuk penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan (84%), yang merupakan indikator positif bagi ketersediaan pelayanan kesehatan dasar di wilayah ini. Namun, terdapat responden yang melaporkan tidak memiliki akses layanan kesehatan (48%) dan menghadapi kesulitan biaya kesehatan (68%), yang mengindikasikan kendala finansial sebagai penghambat utama dalam memperoleh perawatan medis.

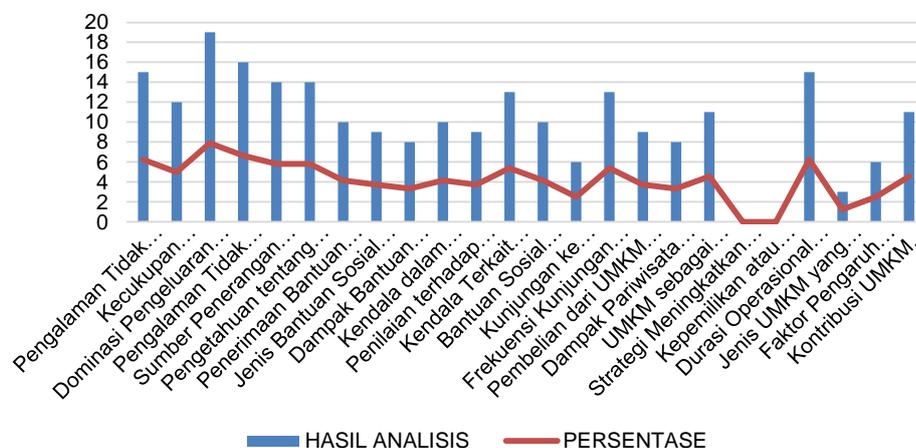
Dalam hal jaminan kesehatan, sebagian besar masyarakat telah menerima bantuan jaminan kesehatan (76%) melalui BPJS Kesehatan (60%), dengan tingkat kecukupan yang dinilai cukup (40%). Jaminan kesehatan ini juga dianggap memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan mereka (44%). Namun, meskipun jaminan kesehatan ini

tersedia, sebagian masyarakat masih menghadapi tantangan finansial dalam mengakses layanan kesehatan, menunjukkan bahwa cakupan manfaat BPJS mungkin belum sepenuhnya memadai atau kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar mereka.

Selain itu, kelengkapan fasilitas kesehatan di wilayah ini dinilai baik oleh sebagian besar responden (56%), yang menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan di Kelurahan Api-Api cukup mendukung. Namun, meskipun fasilitas memadai, kesulitan biaya dan kendala akses menunjukkan bahwa tantangan utama adalah keterjangkauan finansial, bukan ketersediaan fasilitas.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa rencana aksi kesehatan untuk penanggulangan kemiskinan perlu berfokus pada peningkatan keterjangkauan biaya kesehatan, baik melalui peningkatan cakupan dan manfaat BPJS Kesehatan maupun dengan memberikan bantuan kesehatan tambahan bagi keluarga miskin. Penyuluhan dan program bantuan kesehatan gratis atau subsidi dapat diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar kebutuhan kesehatan dasar mereka dapat terpenuhi secara lebih merata.

**Gambar 2.22**  
**Analisis Sosial Ekonomi Kelurahan Api-Api**



Berdasarkan hasil analisis kuisioner mengenai kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Api-Api, Kota Bontang, terdapat sejumlah temuan yang penting dalam menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengalami ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dengan dominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan mencapai 7,88% dan ketidakmampuan mencukupi kebutuhan makanan pokok sebesar 4,98%. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam hal pangan.

Terkait bantuan sosial, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka telah menerima bantuan tunai seperti PKH atau BLT (3,73%) dan merasa bahwa bantuan tersebut sangat membantu ekonomi keluarga (3,32%). Meskipun bantuan ini dianggap efektif dalam jangka pendek, terdapat kendala dalam mengakses informasi tentang program bantuan, yang menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat (4,15%). Responden juga menilai efektivitas program bantuan seperti PKH sebagai cukup efektif (3,73%) namun masih menghadapi kekurangan dalam bentuk pelatihan dan edukasi (5,39%), yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

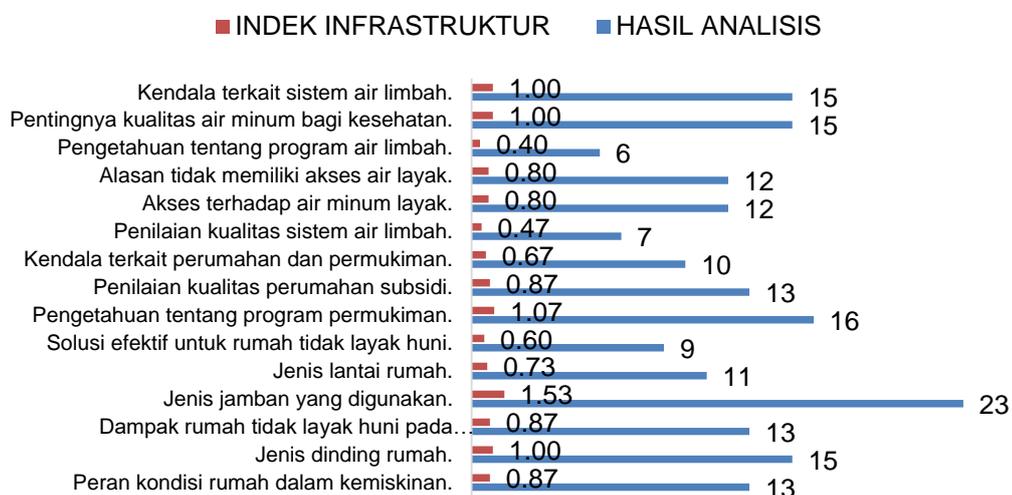
Pada aspek pariwisata dan UMKM, data menunjukkan keterbatasan kontribusi sektor ini terhadap pengurangan kemiskinan, dengan mayoritas responden jarang mengunjungi destinasi wisata lokal atau membeli produk UMKM terkait pariwisata. Namun, UMKM dinilai memiliki potensi besar sebagai alternatif pengentasan kemiskinan, dengan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui akses

modal usaha (4,56%). Beberapa responden juga menyebutkan UMKM dalam bidang jasa sebagai sektor potensial (2,49%).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Api-Api perlu mencakup peningkatan akses terhadap program bantuan sosial yang lebih terarah dan disertai dengan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, perlu adanya strategi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam UMKM dan pariwisata sebagai sumber penghasilan tambahan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan menciptakan keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal.

### 3. Kelurahan Tanjung Laut Indah

**Gambar 2.23**  
**Analisis Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah**

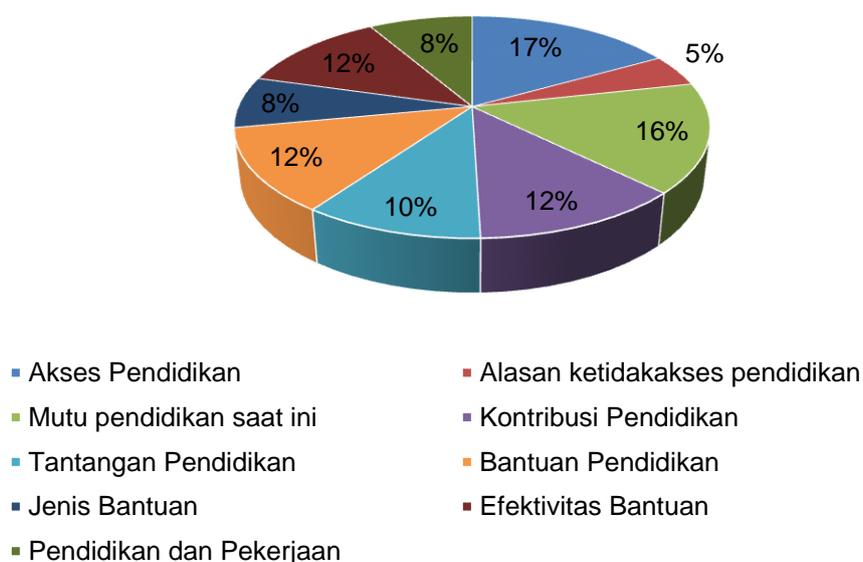


Hasil analisis kuisisioner ini memberikan wawasan mendalam tentang kondisi infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kota Bontang, yang penting untuk penyusunan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data, kondisi rumah tangga berperan signifikan dalam kemiskinan, terutama

dalam aspek dinding rumah yang sudah diplaster dan keberadaan jamban pribadi yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki akses air minum yang layak, di mana sebagian besar responden tidak memiliki akses ini karena keterbatasan sumber air dekat tempat tinggal.

Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sanitasi dan infrastruktur air limbah, yang menunjukkan perlunya intervensi untuk meningkatkan sistem sanitasi di wilayah ini. Selain itu, meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui program-program permukiman dan perumahan subsidi, pengetahuan terkait program air limbah masih rendah, yang mengindikasikan pentingnya sosialisasi lebih lanjut. Rekomendasi aksi mencakup penyediaan bantuan pemerintah untuk renovasi rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, perluasan akses air bersih, serta edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kualitas air minum bagi kesehatan dan program air limbah.

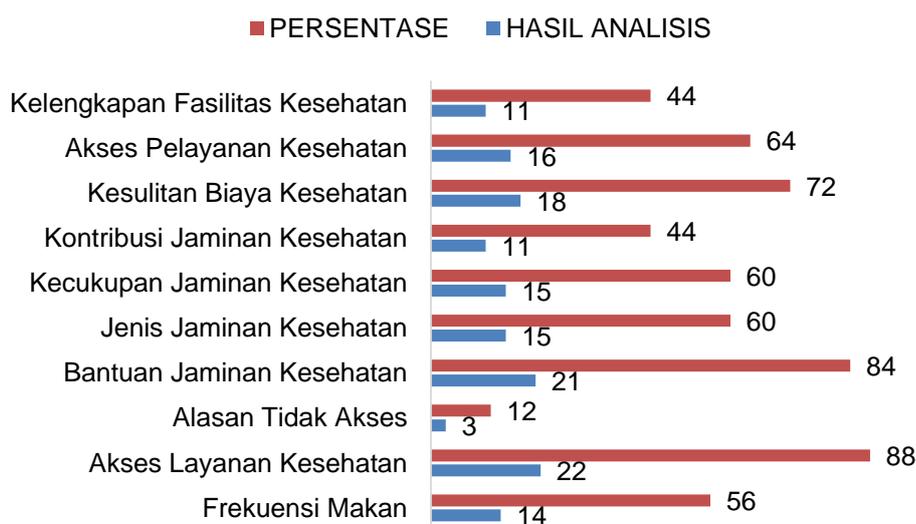
**Gambar 2.24**  
**Analisis Kualitas Pendidikan Kel. Tanjung Laut Indah**



Hasil analisis ini menyoroti kondisi aksesibilitas dan kualitas pendidikan di wilayah yang diteliti, serta tantangan dan efektivitas bantuan pendidikan yang diberikan. Sebagian besar responden memiliki akses terhadap pendidikan, namun biaya pendidikan yang tinggi menjadi tantangan utama dan alasan utama ketidakaksesibilitas bagi sebagian orang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akses pendidikan tersedia, tantangan ekonomi tetap menjadi penghalang yang signifikan.

Mutu pendidikan saat ini dinilai cukup baik oleh mayoritas responden, dan kontribusi pendidikan terhadap kualitas hidup dinilai sangat besar. Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, bantuan berupa buku dan alat tulis sudah diberikan, dan dinilai cukup efektif oleh masyarakat. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap keterkaitan pendidikan dengan peluang pekerjaan juga cukup tinggi, menunjukkan pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk perbaikan ekonomi dan sosial.

**Gambar 2.25**  
**Analisis Kualitas Kesehatan Kel. Tanjung Laut Indah**

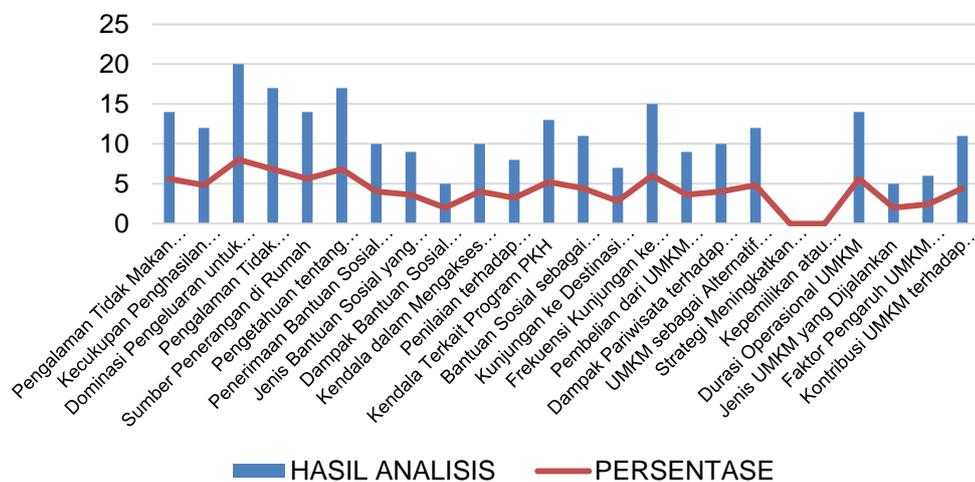


Analisis data ini memberikan gambaran mengenai akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah. Sebagian besar responden (88%) melaporkan memiliki akses terhadap layanan kesehatan, dan sebagian besar telah menerima bantuan jaminan kesehatan, terutama melalui BPJS Kesehatan, dengan tingkat kecukupan yang cukup tinggi (60%). Kontribusi jaminan kesehatan dianggap sangat besar dalam mendukung kesejahteraan mereka, namun biaya kesehatan masih menjadi masalah bagi 72% responden, menunjukkan adanya beban finansial terkait perawatan kesehatan.

Meskipun akses terhadap fasilitas kesehatan tergolong tinggi, sekitar 64% responden melaporkan bahwa mereka tidak selalu mendapatkan pelayanan yang memadai, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan fasilitas atau tenaga kesehatan. Namun, dari sisi infrastruktur, sebanyak 44% responden menilai fasilitas kesehatan di wilayah mereka telah lengkap.

Dari hasil ini, direkomendasikan peningkatan dukungan biaya kesehatan dan pemenuhan layanan yang lebih merata agar semua masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang memadai. Program sosialisasi penggunaan jaminan kesehatan dan upaya peningkatan fasilitas serta pelayanan kesehatan juga perlu diprioritaskan dalam rencana aksi.

**Gambar 2.26**  
**Analisis Sosial Ekonomi Kel. Tanjung Laut Indah**



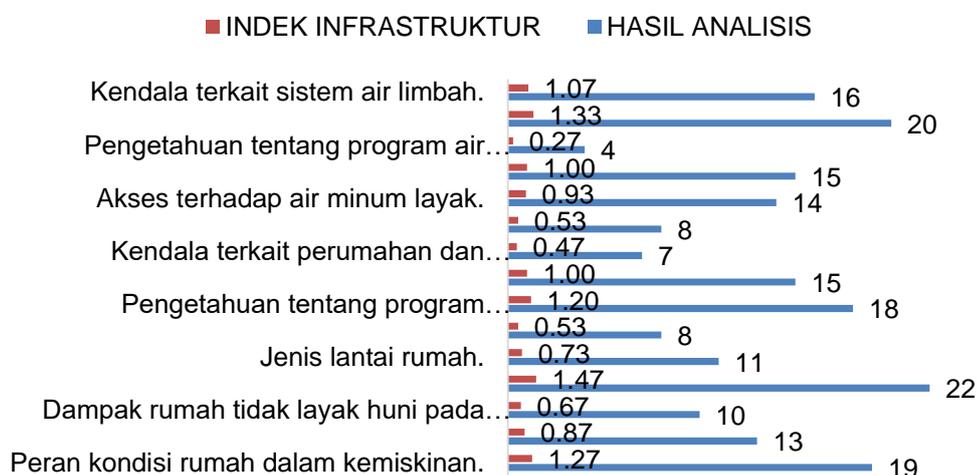
Analisis ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah penelitian terkait pengalaman ekonomi keluarga, bantuan sosial, dan peran UMKM dalam mendukung kesejahteraan. Sebagian besar responden tidak pernah mengalami kekurangan makanan dalam sebulan terakhir, namun kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok masih menjadi tantangan bagi beberapa keluarga (4.82%). Pengeluaran rumah tangga sebagian besar didominasi untuk kebutuhan makanan (8.03%), menunjukkan bahwa prioritas kebutuhan dasar masih tinggi di kalangan masyarakat.

Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dinilai cukup membantu keluarga yang menerima, meskipun terdapat kendala dalam akses akibat kurangnya informasi dan edukasi terkait program ini. Sebagian besar responden setuju bahwa bantuan sosial bersifat solusi jangka pendek, tetapi ada kebutuhan untuk peningkatan pelatihan dan edukasi untuk memberikan dampak jangka panjang.

Pariwisata lokal memiliki dampak terbatas terhadap ekonomi rumah tangga, dan hanya sebagian kecil yang terlibat dalam UMKM pariwisata atau membeli produk UMKM terkait pariwisata. Meski demikian, UMKM secara keseluruhan dianggap sangat berdampak dalam pengentasan kemiskinan, terutama dalam penyediaan akses modal usaha dan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Rekomendasi rencana aksi mencakup perluasan sosialisasi program bantuan sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas pelatihan di sektor UMKM, serta promosi pariwisata lokal untuk meningkatkan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

#### 4. Kelurahan Bontang Barat

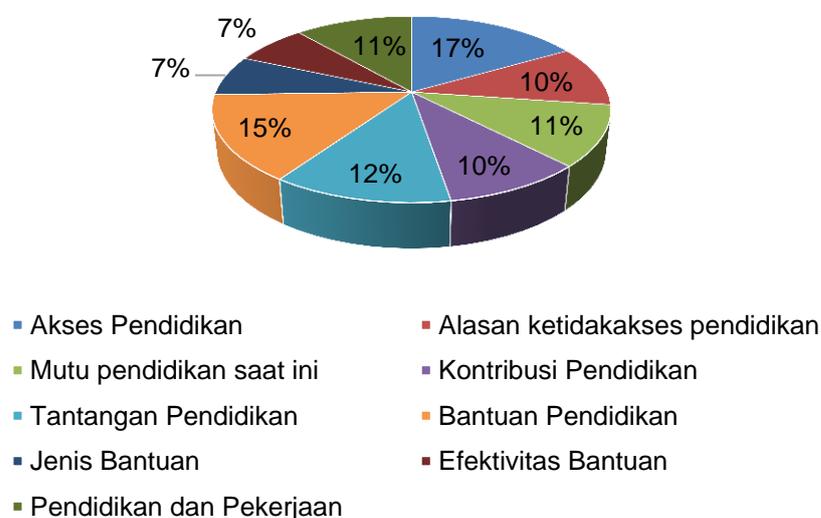
**Gambar 2.27**  
**Analisis Infrastruktur Kelurahan Bontang Barat**



Hasil analisis kuesioner terkait infrastruktur di Kelurahan Bontang Barat, Kota Bontang, menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan data, peran kondisi rumah sangat dianggap penting dengan indeks

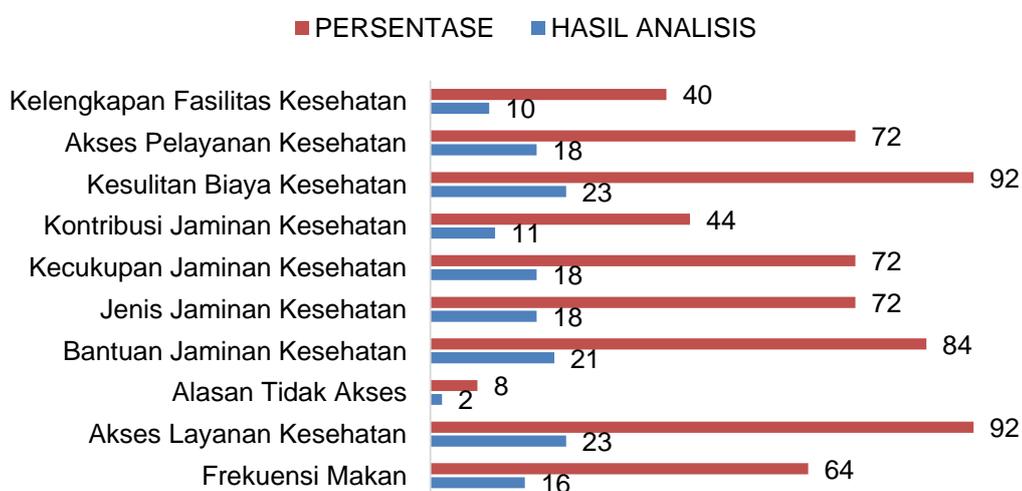
infrastruktur 1,27, yang menunjukkan bahwa peningkatan kondisi perumahan dapat menjadi langkah signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Jenis dinding dan lantai rumah serta keberadaan jamban sendiri mencerminkan kualitas permukiman dan fasilitas dasar yang mendukung kesehatan serta kenyamanan. Indeks tertinggi, yaitu 1,47, ditemukan pada akses ke jamban sendiri, yang menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas sanitasi pribadi berdampak besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, kendala utama terkait sanitasi dan akses air minum adalah kurangnya infrastruktur yang memadai (indeks 1,07 untuk air limbah dan 0,93 untuk akses air minum layak). Masyarakat yang tidak memiliki akses ke air minum layak mencatatkan alasan terbatasnya sumber air terdekat sebagai hambatan utama. Oleh karena itu, intervensi yang melibatkan bantuan renovasi atau pembangunan infrastruktur rumah layak, peningkatan akses terhadap air bersih, serta penyediaan sanitasi yang memadai akan menjadi tindakan prioritas dalam rencana aksi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah ini.

**Gambar 2.28**  
**Analisis Kualitas Pendidikan Kel. Bontang Barat**



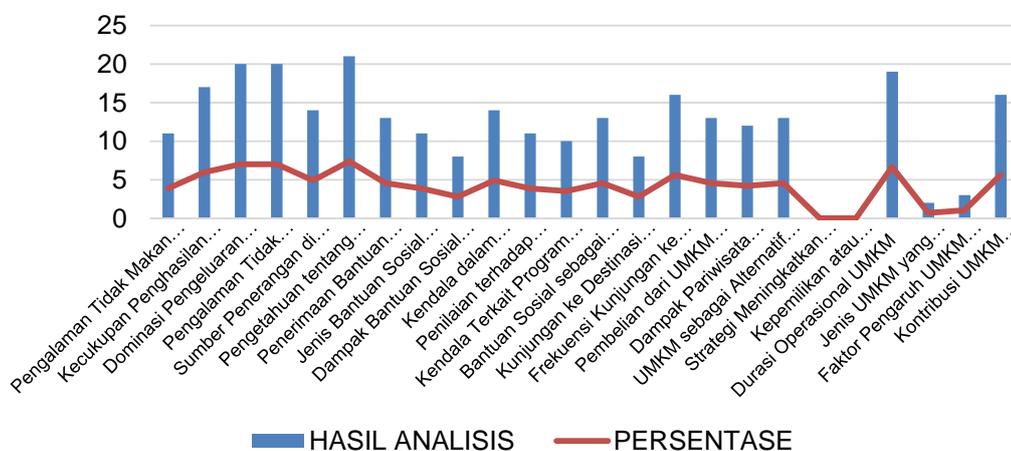
Hasil analisis kuesioner tentang kualitas pendidikan di Kelurahan Bontang Barat, Kota Bontang, menunjukkan bahwa akses pendidikan dianggap cukup baik, dengan 16,67% responden menyatakan memiliki akses terhadap pendidikan. Namun, biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi hambatan utama, baik sebagai alasan ketidakmampuan mengakses pendidikan (10,53%) maupun sebagai tantangan pendidikan secara umum (12,28%). Meskipun demikian, mutu pendidikan saat ini dinilai baik oleh 10,53% responden, dan kontribusi pendidikan terhadap kesejahteraan dianggap sangat besar (9,65%). Bantuan pendidikan melalui beasiswa dinilai sangat efektif (7,02%) dalam membantu masyarakat mengakses pendidikan, dengan 14,91% responden melaporkan menerima bantuan pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan pekerjaan juga dinilai signifikan, dengan 11,40% responden yakin bahwa pendidikan berkontribusi langsung pada kesempatan kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan bantuan pendidikan, terutama melalui subsidi atau beasiswa, sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah ini.

**Gambar 2.29**  
**Analisis Kualitas Kesehatan Kelurahan Bontang Barat**



Hasil analisis kuesioner terkait kualitas kesehatan di Kelurahan Bontang Barat, Kota Bontang, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, dengan 92% responden melaporkan akses tersebut. Mayoritas responden (84%) juga menerima bantuan jaminan kesehatan, terutama dari BPJS (72%), yang dinilai cukup memadai (72%) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Meskipun akses layanan kesehatan dianggap mudah oleh 72% responden, masih ada kesulitan dalam biaya kesehatan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat (92%). Frekuensi makan sebagian besar penduduk adalah tiga kali sehari (64%), yang mengindikasikan tingkat ketahanan pangan yang cukup baik. Namun, hanya 40% responden yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di daerah mereka memiliki peralatan yang memadai, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas. Secara keseluruhan, hasil ini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan memastikan kecukupan jaminan kesehatan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

**Gambar 2.30**  
**Analisis Sosial Ekonomi Kelurahan Bontang Barat**



Hasil analisis kuesioner sosial ekonomi di Kelurahan Bontang Barat, Kota Bontang, mengungkapkan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Mayoritas responden memiliki pengalaman menghabiskan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan makanan, dengan 7,02% responden melaporkan tidak mampu berbelanja pakaian selama setahun terakhir. Sebagian besar rumah tangga menggunakan listrik berdaya 450 VA, yang menunjukkan keterbatasan dalam akses energi. Program bantuan sosial, terutama dalam bentuk bantuan pendidikan, diterima oleh sebagian responden, tetapi dampaknya hanya dianggap cukup membantu (2,81%), dan ada kendala terkait ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan ini (4,91%).

Sektor UMKM memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, meskipun partisipasi masyarakat dalam UMKM masih rendah. Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan strategi peningkatan kontribusi UMKM dan memperkuat akses modal usaha, yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat (5,61%). Pariwisata lokal, khususnya dalam bentuk pembelian makanan dan minuman lokal, juga berperan dalam mendukung ekonomi, namun frekuensi kunjungan wisata lokal masih rendah. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan efektivitas program bantuan, perbaikan target sasaran, serta pengembangan sektor UMKM dan pariwisata lokal sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan.

## 5. Kelurahan Bontang Kuala

**Gambar 2.31**  
**Analisis Infrastruktur Bontang Kuala**

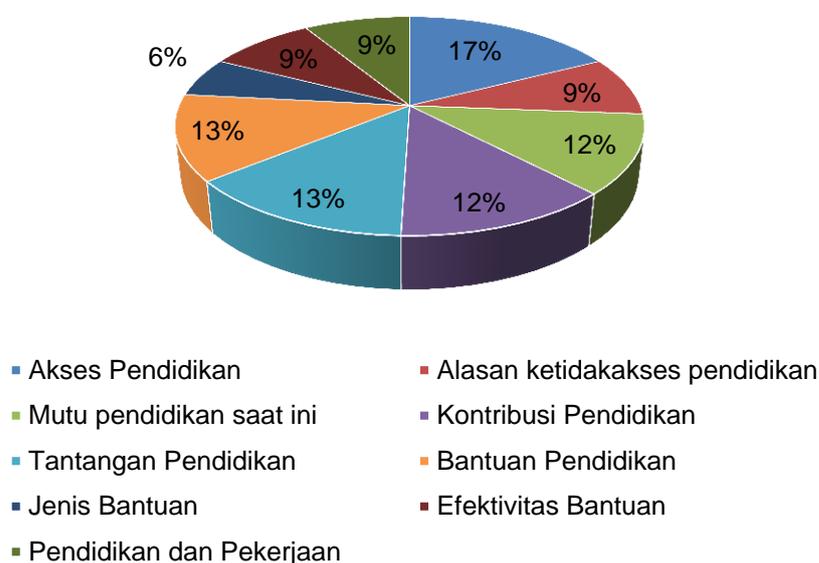


Hasil analisis kuesioner terkait infrastruktur di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, menunjukkan bahwa kondisi rumah memiliki peran signifikan dalam kemiskinan, dengan skor penting (1.33) untuk kondisi rumah yang layak. Sebagian besar responden memiliki dinding yang telah diplester (0.80) namun masih terdapat lantai tanah (0.67) yang menunjukkan adanya kekurangan dalam kualitas tempat tinggal. Keberadaan jamban sendiri terindikasi tinggi (1.33), namun akses terhadap air minum layak masih terbatas, dengan alasan tidak adanya sumber air terdekat (0.93).

Program bantuan sosial dinilai sebagai solusi efektif dalam memperbaiki kondisi infrastruktur dasar, tetapi kendala seperti kurangnya sanitasi (0.73) dan minimnya infrastruktur sistem air limbah (1.33) masih menjadi hambatan utama. Kualitas sistem air limbah juga dinilai rendah (0.40), menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas sanitasi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang program permukiman cukup baik (0.87), namun kesadaran

mengenai program pengelolaan air limbah masih rendah (0.27). Secara keseluruhan, analisis ini menekankan perlunya peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan sistem air limbah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah ini.

**Gambar 2.32**  
**Analisis Kualitas Pendidikan Kel. Bontang Kuala**

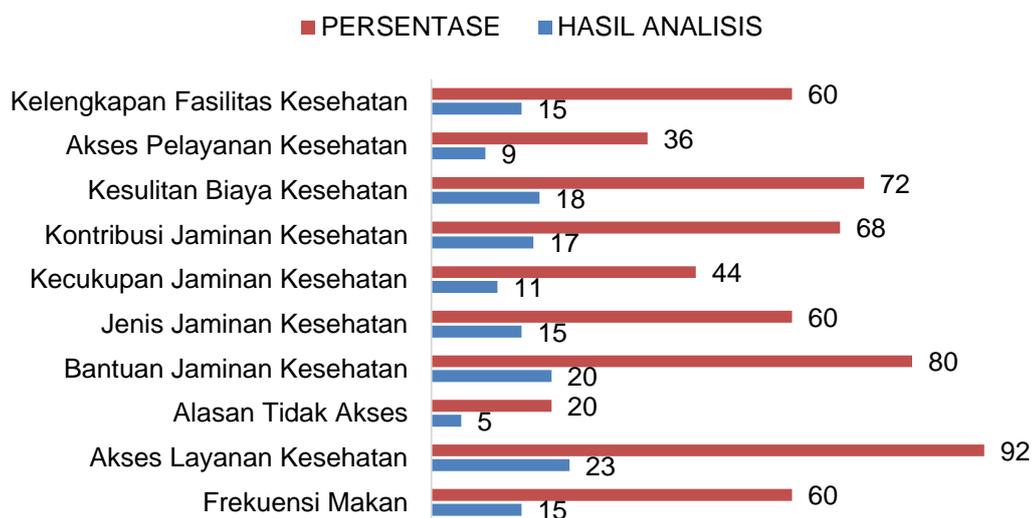


Hasil analisis kuesioner terkait kualitas pendidikan di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, menunjukkan bahwa akses pendidikan cukup baik dengan persentase responden yang memiliki akses sebesar 17.48%. Namun, tantangan utama dalam akses pendidikan adalah biaya yang tinggi, yang menjadi alasan utama ketidakaksesibilitas pendidikan (8.74%) dan tantangan pendidikan (13.59%). Mutu pendidikan dinilai baik oleh responden (11.65%), dan kontribusi pendidikan dianggap sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan (12.62%).

Sebagian besar responden menerima bantuan pendidikan (12.62%), terutama dalam bentuk bantuan biaya sekolah atau kuliah

(5.83%), yang dinilai efektif (8.74%). Responden juga memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa pendidikan berhubungan langsung dengan kesempatan kerja di masa depan (8.74%). Interpretasi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini perlu difokuskan pada peningkatan bantuan pendidikan, terutama dalam aspek pembiayaan untuk meningkatkan akses dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat kurang mampu.

**Gambar 2.33**  
**Analisis Kualitas Kesehatan Kel. Bontang Kuala**



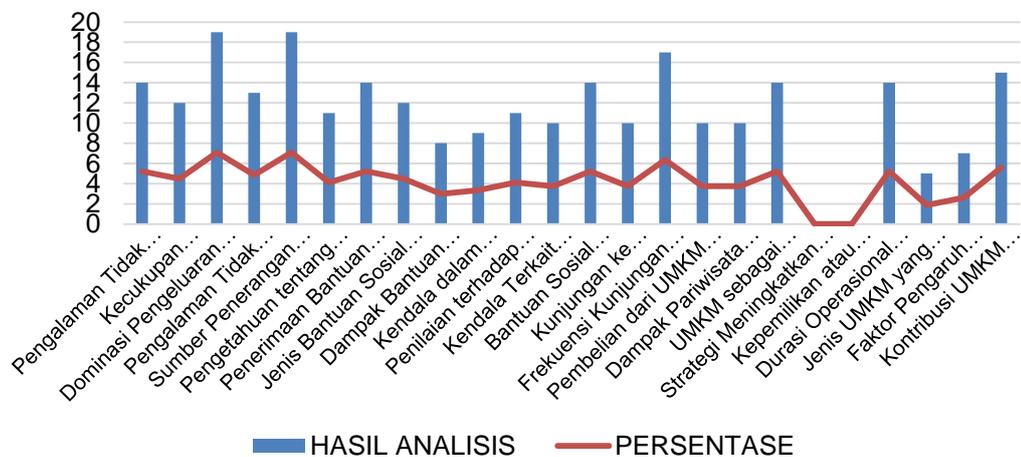
Hasil analisis kuesioner terkait kualitas kesehatan di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki akses ke layanan kesehatan (92%) dan menerima bantuan jaminan kesehatan, dengan BPJS Kesehatan sebagai jenis jaminan yang paling umum (60%). Meski demikian, masih terdapat kendala akses karena jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan (20%) dan adanya kesulitan biaya (72%).

Sebagian besar responden merasa bahwa kontribusi jaminan kesehatan sangat besar (68%), dan sekitar 44% menilai kecukupannya

sangat cukup. Namun, hanya 60% yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah ini lengkap dan memadai. Meski akses layanan kesehatan secara umum baik, masih terdapat responden (36%) yang mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan. Frekuensi makan tiga kali sehari yang dipenuhi 60% responden juga mencerminkan kondisi dasar pemenuhan kebutuhan gizi.

Interpretasi ini menunjukkan pentingnya meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses fasilitas kesehatan, terutama untuk masyarakat dengan keterbatasan biaya dan lokasi yang jauh. Selain itu, penguatan jaminan kesehatan serta perbaikan aksesibilitas layanan kesehatan dapat menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini.

**Gambar 2.34**  
**Analisis Sosial Ekonomi Kel. Bontang Kuala**



Hasil analisis kuesioner mengenai kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Sekitar 5.22% responden pernah mengalami tidak makan dalam sebulan terakhir, dan 4.48% merasa penghasilan mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan makanan mendominasi pengeluaran rumah

tangga (7.09%), sementara akses ke pakaian dan perlengkapan rumah tangga lainnya terbatas, dengan 4.85% responden tidak berbelanja pakaian dalam setahun.

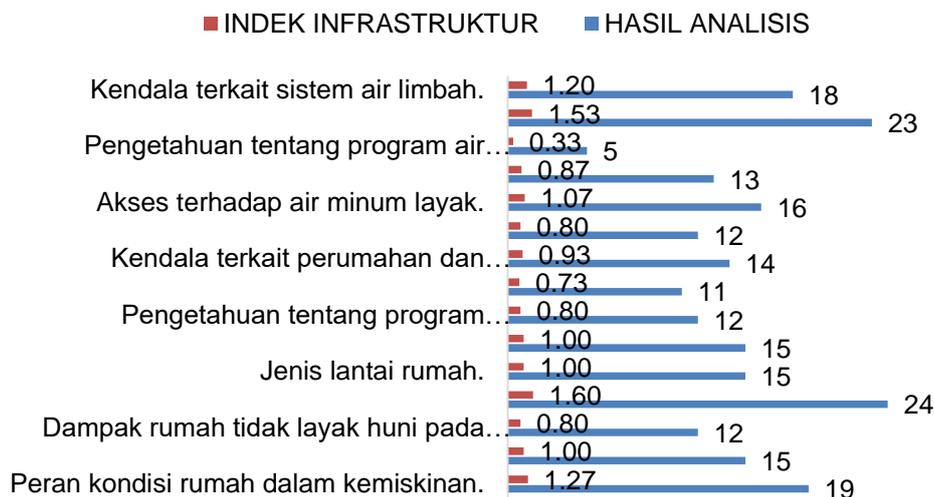
Sementara itu, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah membantu beberapa keluarga, meski masih ada kendala dalam aksesibilitas karena ketidaktepatan sasaran (3.36%). Selain itu, terdapat kritik terkait efektivitas program ini, dengan beberapa responden menilai dukungan pemerintah kurang memadai (3.73%).

Sektor pariwisata dan UMKM memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan pembelian produk UMKM masih rendah, dengan sebagian besar responden hanya mengunjungi destinasi lokal sekali dalam setahun (6.34%) dan jarang membeli produk terkait pariwisata (3.73%). UMKM juga diakui memiliki dampak positif dalam pengentasan kemiskinan, tetapi minimnya keterlibatan warga dalam kepemilikan dan pengelolaan UMKM serta kendala dalam akses modal usaha menjadi hambatan yang perlu diperhatikan.

Interpretasi ini mengindikasikan perlunya penguatan dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan program bantuan sosial, memperluas peluang pengembangan UMKM, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pariwisata lokal. Rencana aksi ke depan sebaiknya mencakup penyediaan akses modal bagi UMKM, pembinaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta evaluasi dan peningkatan efektivitas program sosial yang sudah berjalan.

## 6. Kelurahan Kanaan

**Gambar 2.35**  
**Analisis Infrastruktur Kelurahan Kanaan**



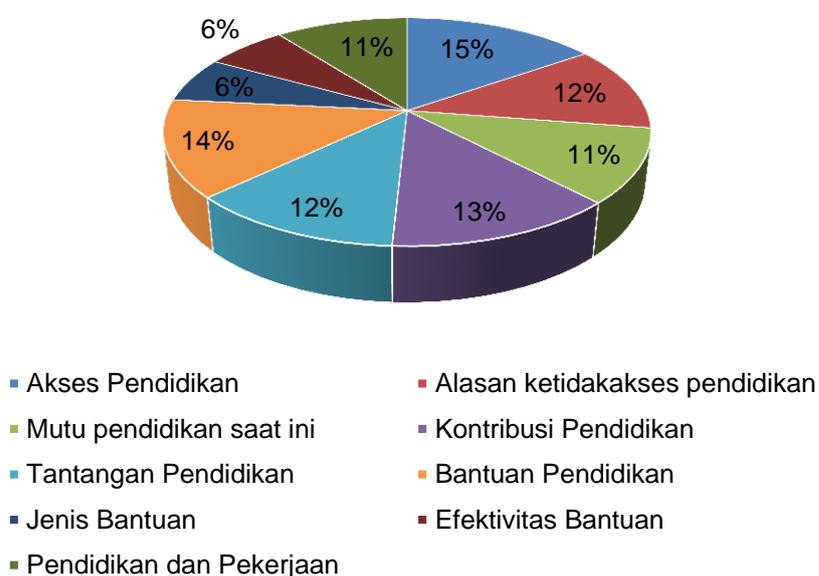
Hasil analisis kuisioner mengenai kondisi infrastruktur di Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, menunjukkan bahwa aspek perumahan dan akses terhadap air bersih memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Mayoritas responden menilai kondisi rumah sangat penting dalam mempengaruhi status kemiskinan mereka, dengan kondisi dinding dan lantai rumah yang sebagian besar sudah diplester, serta penggunaan jamban sendiri yang mencapai indeks tertinggi (1.60). Hal ini menunjukkan upaya masyarakat untuk mencapai standar perumahan yang layak, meskipun masih terdapat hambatan signifikan pada akses pendidikan dan pekerjaan akibat kondisi rumah yang kurang memadai (0.80).

Akses terhadap air minum layak menjadi salah satu kendala utama, dengan banyak responden yang tidak memiliki akses tersebut (indeks 1.07). Alasan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya sumber air bersih di dekat tempat tinggal, yang menunjukkan adanya keterbatasan

infrastruktur dasar di wilayah ini. Selain itu, kualitas sistem air limbah juga dinilai cukup baik (0.80), namun terdapat kendala terkait kurangnya infrastruktur air limbah (1.20), yang memperkuat kebutuhan akan peningkatan fasilitas ini.

Pengetahuan masyarakat tentang program perumahan dan air limbah masih tergolong rendah, yang dapat menghambat efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, rencana aksi yang perlu diprioritaskan meliputi peningkatan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih dan sistem sanitasi, serta program edukasi terkait fasilitas perumahan dan kesehatan lingkungan.

**Gambar 2.36**  
**Analisis Kualitas Pendidikan Kelurahan Kanaan**

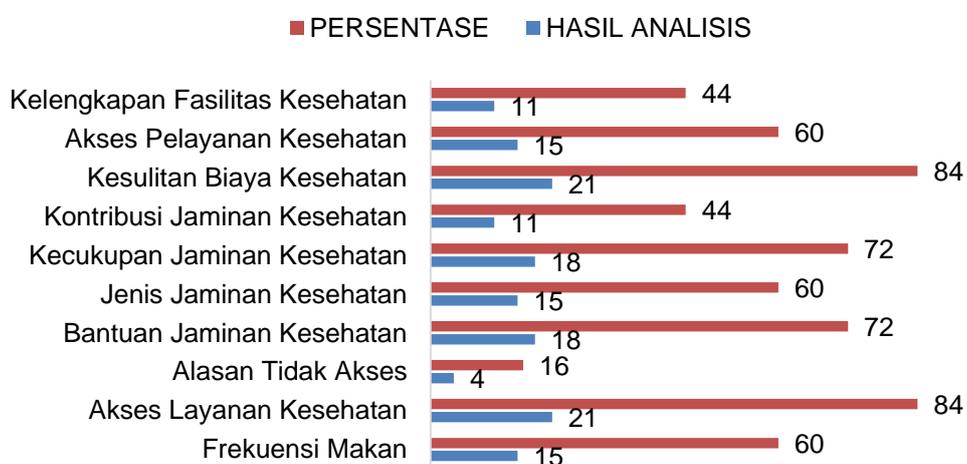


Hasil analisis kuisioner terkait kualitas pendidikan di Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, menunjukkan bahwa akses pendidikan cukup baik dengan persentase 15.32%, meskipun masih ada kendala terkait biaya pendidikan yang tinggi, yang menjadi alasan utama ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan (12.10%). Masyarakat menilai

bahwa pendidikan berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan, dengan kontribusi pendidikan yang dinilai sangat signifikan (12.90%) terhadap peluang pekerjaan. Namun, tantangan biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi hambatan utama yang perlu ditangani secara efektif.

Selain itu, bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa telah diterima oleh sebagian masyarakat (13.71%), meskipun efektivitasnya masih dinilai cukup rendah (6.45%). Dukungan ini harus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun cakupan untuk dapat mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju pekerjaan terlihat cukup tinggi, dengan tingkat keyakinan masyarakat akan keterkaitan pendidikan dan pekerjaan mencapai 10.48%. Rencana aksi yang dapat diusulkan adalah peningkatan akses bantuan beasiswa dan subsidi pendidikan, serta sosialisasi terkait peluang bantuan pendidikan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan dukungan dalam mengatasi tantangan biaya pendidikan tinggi.

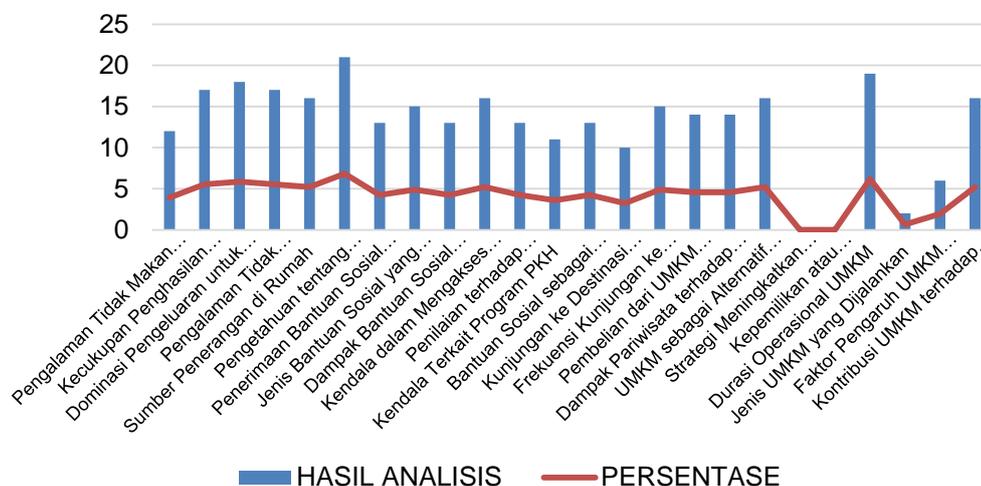
**Gambar 2.37**  
**Analisis Kualitas Kesehatan Kelurahan Kanaan**



Hasil analisis kuisioner mengenai kualitas kesehatan di Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan (84%), yang didukung oleh bantuan jaminan kesehatan seperti BPJS (72%). Jaminan kesehatan dinilai cukup memadai oleh sebagian besar responden (72%), dan kontribusinya terhadap kesejahteraan kesehatan dinilai besar (44%). Namun, terdapat hambatan terkait biaya kesehatan, dengan 84% responden mengalami kesulitan dalam hal ini. Akses pelayanan kesehatan juga dinilai mudah oleh 60% responden, meskipun hanya 44% yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di daerah tersebut memiliki peralatan yang memadai.

Dari temuan ini, rencana aksi yang dapat disusun meliputi peningkatan dukungan fasilitas kesehatan, terutama dalam melengkapi peralatan yang diperlukan untuk pelayanan yang optimal. Selain itu, program subsidi atau bantuan tambahan dapat difokuskan untuk mengurangi beban biaya kesehatan yang dirasakan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Peningkatan informasi mengenai akses dan jenis jaminan kesehatan yang tersedia, seperti BPJS, juga dapat memperkuat keberlanjutan kesehatan masyarakat dan membantu mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan di kelurahan ini.

**Gambar 2.38**  
**Analisis Sosial Ekonomi Kelurahan Kanaan**



Hasil analisis kuisioner tentang kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, menunjukkan beberapa faktor penting terkait kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan melalui sektor UMKM dan pariwisata. Mayoritas responden memiliki pengalaman keterbatasan dalam kebutuhan pangan dan pakaian, dengan 5.86% mengalokasikan pengeluaran utama untuk makanan dan 5.54% tidak berbelanja pakaian dalam setahun. Meski demikian, tingkat penerimaan bantuan sosial masih cukup baik (6.84% menyatakan mengetahui program perlindungan sosial), namun dampaknya dianggap terbatas dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kendala utama dalam bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran (5.21%).

Pada sektor ekonomi lokal, UMKM dan pariwisata diakui memiliki peran dalam pengurangan kemiskinan, namun kontribusinya masih kurang maksimal. Sekitar 5.21% responden menganggap UMKM berdampak terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi masih terdapat kendala seperti keterbatasan modal usaha (1.95%). Strategi peningkatan UMKM dan infrastruktur pendukung menjadi prioritas untuk

mengoptimalkan peran UMKM sebagai sumber pendapatan alternatif dan solusi jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan.

## **BAB III**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang**

Menindaklanjuti hasil analisis tersebut, Pemerintah Kota Bontang menyusun kebijakan dan prioritas daerah tahun 2023 melalui kegiatan-kegiatan bersifat *decated* sebagai berikut:

1. Peningkatan pengurangan kemiskinan, melalui upaya:
  - a. Peningkatan kualitas data kemiskinan
  - b. Pengembangan kelompok usaha masyarakat melalui program stimulant RT
  - c. Pemberian bantuan makanan siap santap bagi lansia miskin dan terlantar
  - d. Pelayanan dokter kunjung bagi pasien jompo dan miskin;
  - e. Pemberian stimulan dana kesehatan bagi masyarakat peserta penerima upah/bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan upaya penurunan angka pengangguran terbuka, melalui upaya:
  - b. Kerjasama pemagangan dan penyaluran tenaga kerja;
  - c. Penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
  - d. Pengembangan kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan
  - e. Pembangunan “Rumah Kreasi Milenial” sebagai sarana pengembangan kreasi bagi pemuda
  - f. Kerjasama dengan BLK dalam peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja

## B. Program Kemiskinan Tahun 2024

**Tabel 3.1**  
**Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi pada tahun	Dinas Ketenagakerjaan
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Dinas Ketenagakerjaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar	Dinas Kesehatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI TAHUNAN**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2024 adalah “Peningkatan Ekonomi Melalui Produktivitas Sektor Pariwisata dan Pertanian”. Tema tersebut diharapkan mampu memulihkan perekonomian daerah yang terdampak Pandemi Covid-19. Pembangunan ini juga dipastikan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi Covid-19 secara terukur, efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bontang menetapkan 5 (Lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. **Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**

Prioritas pembangunan pertama ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghadapi tantangan kedepan. Hal ini dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan dan penguatan kelembagaan, mental serta keagamaan. Tujuan utama dari prioritas pembangunan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Kota Bontang yang berdaya saing.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang**



b. **Prioritas Pembangunan 2 : Penguatan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan**

Prioritas pembangunan kedua ditujukan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur terutama dalam hal layanan dasar bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mendukung konektivitas daerah. Prioritas pembangunan kedua ini bertujuan untuk pengembangan infrastruktur terutama pelayanan dasar yang berkualitas dan produktif dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

**Gambar 4.2**  
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang**



c. **Prioritas Pembangunan 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Inovasi Dan Pelayanan Prima**

Prioritas pembangunan ketiga ditujukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif yang membuka ruang publik untuk berpartisipasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Reformasi birokrasi diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik, efisiensi manajemen pemerintahan dan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

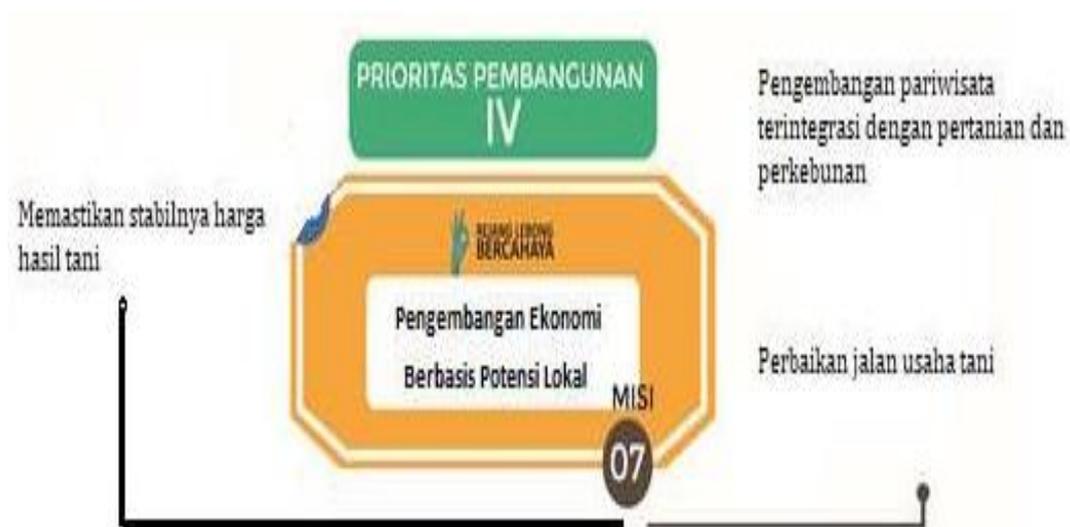
**Gambar 4.3**  
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang**



d. Prioritas Pembangunan 4 : Perkembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Prioritas pembangunan ke empat ditujukan dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi berbasis lokal. Sektor unggulan yang ada di Kota Bontang adalah pertanian, sehingga diupayakan dengan peningkatan dan pengembangan disektor ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Prioritas pembangunan ke empat ini bertujuan agar pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian menjadi produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk unggulan, perbaikan infrastruktur pertanian serta integrasi dengan sektor lain seperti pariwisata.

**Gambar 4.4**  
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang**



e. Pengurangan Kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja

Prioritas pembangunan kelima ditujukan dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian dimasyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja, optimalisasi BUMDes serta perbaikan iklim berinvestasi. Prioritas pembangunan kelima ini bertujuan untuk meningkatkan sektor yang dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

**Gambar 4.5**  
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang**



Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak bagi perekonomian dan sosial masyarakat yang juga berimbas pada masyarakat Kota Bontang. Secara makro kondisi perekonomian daerah akibat pandemi covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Bontang seperti sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan sektor administrasi pemerintahan.

Secara mikro, pandemi covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah Kota Bontang untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang berfokus pada proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bontang diharapkan dapat menstimulan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dan pertanian sehingga berdampak pada pemulihan dan peningkatan ekonomi dan dalam upaya mewujudkan visi, misi seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 2021-2026 maka harus dijabarkan agar Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 akan lebih terdeskripsikan.

#### **B. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025**

Rencana aksi tersebut juga harus mempertimbangkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri, untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkelanjutan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin di Kota Bontang. Dengan demikian, RAT 2025 yang dirancang dengan baik dan merujuk pada RPKD Kota Bontang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan di kota ini

Berikut adalah revisi matriks rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang dengan nilai anggaran yang lebih tepat untuk setiap program berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Nilai anggaran ini telah disesuaikan untuk memastikan alokasi yang efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang diharapkan.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bontang (2025)**

No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana	Strategi
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar	Pembangunan Pos Kesehatan di Kelurahan Prioritas	500,000,000	6 Pos Kesehatan Baru	Membangun pos kesehatan dengan fasilitas dasar di setiap kelurahan prioritas.	Dinas Kesehatan	Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan untuk meningkatkan kepemilikan.
2		Program Subsidi Biaya Kesehatan	Bantuan Subsidi Biaya Kesehatan untuk Keluarga Miskin	300,000,000	1,000 Keluarga	Memberikan bantuan biaya kesehatan bagi keluarga miskin yang terdaftar.	Dinas Sosial	Membangun kemitraan dengan lembaga kesehatan untuk mempermudah akses layanan.
3	Peningkatan Akses Pendidikan	Program Beasiswa Pendidikan	Pemberian Beasiswa untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu	500,000,000	500 Anak	Menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.	Dinas Pendidikan	Mengidentifikasi dan merekrut anak-anak yang membutuhkan melalui sekolah dan masyarakat.
4		Peningkatan Sarana Pendidikan	Pengadaan Buku dan Alat Tulis untuk Sekolah di Daerah Miskin	250,000,000	6 Kelurahan	Menyediakan buku dan alat tulis untuk sekolah-sekolah di daerah miskin.	Dinas Pendidikan	Bekerjasama dengan donor dan pihak ketiga untuk pengadaan alat tulis secara berkelanjutan.
5	Perbaikan Infrastruktur Dasar	Peningkatan Akses Air Bersih	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kelurahan	1,000,000,000	6 Kelurahan	Membuat fasilitas air bersih dan sanitasi untuk masyarakat di kelurahan prioritas.	Dinas PUPR	Melakukan studi kelayakan untuk memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6		Perbaikan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase di Lingkungan Padat Penduduk	700,000,000	4 Kelurahan	Membangun sistem drainase untuk mencegah banjir di daerah padat penduduk.	Dinas PUPR	Menggunakan teknologi ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses pemeliharaan.
7	Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Pengembangan UMKM Lokal	Pelatihan dan Pemberian Modal bagi Pelaku UMKM	800,000,000	200 Pelaku UMKM	Mengadakan pelatihan dan memberikan modal usaha bagi pelaku UMKM.	Dinas Koperasi dan UMKM	Mengadakan program mentoring berkelanjutan untuk pelaku UMKM setelah pelatihan.
8		Fasilitasi Pasar Lokal	Pembangunan Pasar Tradisional di Kelurahan Prioritas	1,200,000,000	2 Pasar Baru	Membangun pasar tradisional sebagai tempat pemasaran produk lokal.	Dinas Perdagangan	Mengembangkan kerjasama dengan pengusaha lokal untuk meningkatkan daya saing pasar.
9	Pengembangan Sektor Pariwisata	Peningkatan Destinasi Wisata Lokal	Pengembangan Destinasi Wisata di Kelurahan	600,000,000	3 Destinasi Wisata Baru	Mengembangkan potensi wisata lokal dan melibatkan masyarakat setempat.	Dinas Pariwisata	Menyusun paket wisata yang melibatkan komunitas lokal untuk menarik wisatawan.
10		Pemberdayaan Masyarakat dalam Wisata	Pelatihan Keterampilan Wisata (kuliner, kerajinan)	300,000,000	100 Orang Terlatih	Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi	Dinas Pariwisata	Menyusun program kemitraan dengan pelaku wisata untuk memperkenalkan produk lokal.
11	Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial untuk Keluarga Rentan	Pemberian Bantuan Sembako dan Kebutuhan Pokok	500,000,000	1,000 Keluarga	Menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada keluarga miskin dan rentan.	Dinas Sosial	Menggunakan data yang akurat untuk mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran.

12		Penguatan Program Perlindungan Sosial	Sosialisasi Program Perlindungan Sosial	150,000,000	6 Kelurahan	Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan warga mengenai program perlindungan sosial.	Dinas Sosial	Melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi warga dalam sosialisasi.
----	--	---------------------------------------	---	-------------	-------------	---	--------------	---

### Total Anggaran

- **Total Anggaran untuk Semua Program: Rp 6,300,000,000**

### Penjelasan Anggaran

- a. Anggaran untuk setiap program telah disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan yang lebih mendetail, mempertimbangkan jumlah sasaran, dan kompleksitas kegiatan.
- b. Anggaran yang lebih besar dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung dan luas terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

### Penjelasan Strategi

1. **Melibatkan Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan.
2. **Kemitraan:** Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, donor, dan sektor swasta, untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.
3. **Penggunaan Data yang Akurat:** Menggunakan data yang tepat untuk menentukan penerima bantuan dan kebutuhan masyarakat, agar program lebih efektif.
4. **Program Berkelanjutan:** Menerapkan program mentoring dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setelah pelatihan awal.
5. **Teknologi Ramah Lingkungan:** Menerapkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan utama dari rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2025 adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan di enam kelurahan prioritas. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

melalui akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan infrastruktur publik. Selain itu, tujuan ini juga mencakup peningkatan keterampilan masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi, yang diharapkan dapat membuka peluang pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Tujuan ini selaras dengan visi pembangunan Kota Bontang yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian kesetaraan sosial-ekonomi di seluruh wilayahnya.

Sasaran pembangunan pada program ini meliputi tercapainya akses yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar dan pengurangan ketimpangan ekonomi antara masyarakat miskin dan non-miskin. Dalam aspek kesehatan, sasaran utamanya adalah meningkatnya akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin serta peningkatan kesehatan lingkungan, yang diukur melalui penurunan angka penyakit berbasis lingkungan dan peningkatan angka cakupan jaminan kesehatan. Di sektor pendidikan, sasaran mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui beasiswa dan program bantuan belajar. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kemampuan generasi muda untuk bersaing di dunia kerja.

Di sektor perumahan dan infrastruktur, sasaran pembangunan adalah pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan peningkatan akses terhadap air bersih serta sanitasi. Infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, sasaran difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja

serta mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin. Program bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif.

Secara keseluruhan, melalui matriks rencana aksi ini, Kota Bontang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan. Sasaran pembangunan ini tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan tetapi juga memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan, serta mampu mandiri dalam jangka panjang. Dengan begitu, rencana aksi ini akan menjadi pijakan penting bagi terciptanya kota yang inklusif, sejahtera, dan berdaya saing.

### C. Rencana Aksi Skala Prioritas

Berikut adalah matriks tabel yang menunjukkan prioritas program berdasarkan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di enam kelurahan di Kota Bontang untuk kurun waktu satu tahun (2025). Matriks ini mencakup program, kegiatan, anggaran, target kinerja, dan OPD pelaksana.

**Tabel 4.2**  
**Matriks Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan (2025)**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	OPD Pelaksana
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar	500,000,000	6 Pos Kesehatan Baru	Dinas Kesehatan
2	Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial	Pemberian Bantuan Sembako dan Kebutuhan Pokok	400,000,000	1,000 Keluarga	Dinas Sosial
3	Peningkatan Akses Pendidikan	Program Beasiswa Pendidikan	400,000,000	500 Anak	Dinas Pendidikan

4	Peningkatan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	800,000,000	6 Kelurahan	Dinas PUPR
5	Pengembangan UMKM Lokal	Pelatihan dan Pemberian Modal bagi Pelaku UMKM	700,000,000	200 Pelaku UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
6	Pengembangan Sektor Pariwisata	Peningkatan Destinasi Wisata Lokal	500,000,000	3 Destinasi Wisata Baru	Dinas Pariwisata

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan Kota Bontang tahun 2024 di susun berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Bontang tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2025 dan diharapkan pula menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan, oleh karena itu Rencana Aksi Tahunan (RAT) perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah.

Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Pelaksanaan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat melibatkan dunia usaha/swasta, lembaga kemasyarakatan, akademisi, lembaga keagamaan, mitra pembangunan dan media massa sehingga dalam pelaksanaannya perlu melibatkan mekanisme kerja.

Regulasi dalam peraturan daerah yang akan datang dapat mengkolaborasi berbagai elemen kekuatan pelaku ekonomi dalam manajemen penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang. Pola pendekatan ini akan memungkinkan pemerintah daerah dan unsur perusahaan atau elemen lain mendapatkan ruang untuk membantu pengentasan masyarakat miskin di Kota Bontang.

Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) diharapkan bisa menjadi pemicu percepatan dalam menurunkan indeks

kemiskinan di Kota Bontang melalui sebuah pendekatan yang menyeluruh, terpadu dan pelaksanaannya dikerjakan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.

## **B. Saran/Rekomendasi**

1. Untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan ini secara kelembagaan dilaksanakan secara terpadu yang pelaksanaannya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang dikoordinasikan dalam satu tim terpadu sehingga tercermin dalam pengalokasian anggaran setiap tahunnya dalam memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan.
2. Penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang dalam membangun partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu keterlibatan perusahaan-perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan berperan langsung, pemberian bantuan permodalan dan perkreditan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, A dan Hikmat H. 2004. ***Participatory Research Appraisal***. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011a). ***Counting and multidimensional poverty measurement***. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011b). ***Counting and multidimensional poverty measurement***. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Anselin, L. (1995). ***Local Indicators of Spatial Association—LISA***. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
- Anshori, A. Ghofur. 2006. ***Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan***. Jogjakarta : Gadjah Mada University Press
- Aslam, M. (2023). ***Cochran's Q test for analyzing categorical data under uncertainty***. *Journal of Big Data*, 10(1), 147. <https://doi.org/10.1186/s40537-023-00823-3>
- Babbie, E. R. (2010). ***The Practice of Social Research***. Wadsworth Cengage Learning.
- BPS. (2024). ***Badan Pusat Statistik, Bontang dalam Angka***.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). ***Growth is Good for the Poor***. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Field, A. (2009). ***DISCOVERING STATISTICS USING Spss***. SAGE Publications.
- Haughtin, J., & Khandker, S. R. (2009). ***Poverty and Inequality***. The World Bank.
- Jolliffe, D., & Prydz, E. B. (2016). ***Estimating international poverty lines from comparable national thresholds***. *The Journal of Economic Inequality*, 14(2), 185–198. <https://doi.org/10.1007/s10888-016-9327-5>
- Kemenkop UKM. (2023). ***Laporan Tahunan Koperasi***.
- Pemerintah Kota Bontang. (2023). ***Profil Ekonomi dan Industri***

**Bontang.**

- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*.
- Reza Widjaja, A. (2019). *Perumusan Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Ilir, Kronjo, Tangerang*. In *Management, and Industry (JEMI)* (Vol. 2, Issue 3).
- Rivai, Veithzal (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidharta, Arif. (2009). *Meuwissen, tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Reflika Aditama.
- Suharno; Isman & Erwinta, P. (2021). *Naskah Akademik Tentang Penanggulangan Kemiskinan*. Samarinda : Bakahumas UnMul
- Sukarsa, G. P. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). *Analisis Dana Alokasi Khusus, Realisasi Penanaman Modal Asing Dan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Provinsi Bali*. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.686>
- Supriatna. (1997) *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Press
- Syahputra, A., & Rofizar, H. (2023). *Poverty in Community Social and Economic Development Perspective*. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(2), 103–118. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.13328>
- UNDP. (2019). *Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*.
- World Bank. (2000). *Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*.

World Bank Group. (2018). *Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana Diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Sumber Lainnya**

Angka presentasi kemiskinan Kota Bontang sejak tahun 2018, 2019, dan 2020 dari BPS Kota Bontang yaitu melalui <https://bontangkota.bps.go.id>

<https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/853/september-2020-->

[persentase-penduduk-miskin-di-kalimantan-timur- sebesar-6-64-persen.html](#)

<https://bontangkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>

<https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>

<https://bontangkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>

<https://www.bappenas.go.id/files/5413/6082/9497/bab-16-penanggulangan-kemiskinan.pdf>

<http://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-13-tahun-2011-tentang-penanganan-fakir-miskin/#sthash.T56kec1r.dpuf>),

<https://bontangkota.bps.go.id/publication/download>